

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

Transformasi Diklat BPPK

Edisi 21/2014

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

CALL CENTER

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA

HALO BPPK



021-29054300



hubungi kami untuk informasi:
#diklat keuangan negara
#beasiswa
#STAN
#pengaduan dan saran

Jam layanan:
setiap hari kerja Pkl. 08.00 s.d 16.00

Social Media BPPK:



Find Us on Facebook
facebook.com/bppk.kemenkeu



Follow Us on Twitter
@BPPKkemenkeu
@BPPKlive

Daftar Isi

Salam Redaksi	2
Lintas Peristiwa	4
Liputan Utama	6
Liputan Khusus	14
Profil	18
Kuis	22
Serambi Ilmu	23
Mata Air	53
Klinik Sehat	55
Tips n Trik	57
English Corner	59
Selasar	60
Point Of Interest	61
Kalender Diklat	63
Resensi Buku	64
Kang Edu	65

Salam Redaksi

Salam Edukasi untuk para pembaca, kita bersua kembali pada edisi 21 di tahun 2014 ini. Edisi kali ini memberikan nuansa hitam dan putih, sepasang warna universal di dunia yang cocok dipadukan dengan warna apa saja. Seperti pada edisi sebelumnya, artikel-artikel serambi ilmu menjadi sentral pada majalah ini. Beberapa artikel menarik antara lain terkait dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan, manajemen ekonomi, materi kepemimpinan, peluang ekonomi, artikel mengenai Undang Undang KUP, serta dari bidang teknologi akan mengulas penggunaan jaringan listrik untuk data.

Liputan Utama mengangkat tema Transformasi, sebuah perubahan di dalam tubuh BPPK yang terkait dengan bidang pembelajaran. Proses, mulai dari perencanaan sampai pengukuran, output yang diharapkan dan bagaimana langkah selanjutnya, akan dikupas pada liputan utama kali ini. Liputan Khusus akan mendalami mengenai kemas pembelajaran tentang peranan penilaian dalam pengelolaan kekayaan negara, serta mengupas bagai-

na *soft competencies* dikembangkan di BPPK. Sebuah perjalanan ke salah satu kota nan asri, yaitu Magelang, akan membawa Anda merasakan berbagai kuliner yang ada disana. Pada rubrik Klinik Sehat, tips menjaga kesehatan di musim pancaroba tampaknya sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Sambutan dan ungkapan hati dari para *stakeholder* BPPK pada rubrik Selasar, disuarakan oleh Kepala Kantor Wilayah di Pontianak dan Medan. Ini menandakan bahwa BPPK memang diterima dengan baik oleh penggunanya. Masih banyak artikel yang menunggu Anda di halaman berikutnya, jadi kami persilahkan Anda untuk menikmati lembaran-lembaran ini, dan akhirnya kami ucapkan selamat kepada pemenang kuis pada edisi sebelumnya.

Terima kasih dan tetap berkarya tiada henti.



Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPk

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Pemimpin Redaksi

Iqbal Soenardi

Redaktur

Marsedi Situmorang

M. Ridhwan

Surono

Ahmad Fatkhur

Supriyanto

Bambang Roosdiyanto

Bambang Sancoko

M. Ridhwan Galela

Indrayansyah Nur

Nurhidayati

Agus Suharsono

Sugeng Satoto

Agus Hekso Pramudji

Gathot Subroto

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

Layout

Muhammad Fath Kathin

Ungguk H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5* maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@depkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7262175
http: www.bppk.kemenkeu.go.id



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan - Gadog, Selasa, 15 April 2014

Rapat Pimpinan bulan April 2014 yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan BPPK membahas isu-isu terkini seputar BPPK dan Kementerian Keuangan. Foto: Eros L. Mursalin

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Berhasil Menjuarai CPA Australia Accounting Competition 2014

STAN berhasil menyabet juara pertama dalam CPA Australia Accounting Competition 2014, 22 Maret 2014 di Jakarta, mengalahkan ke-19 tim dari universitas lainnya. CPA Australia Accounting Competition merupakan sebuah ajang yang diselenggarakan oleh perwakilan CPA Australia di Indonesia. Acara ini dikemas dalam bentuk kompetisi yang diikuti oleh 20 universitas negeri maupun swasta terpilih di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tahun ini adalah tahun kedua acara ini dilaksanakan dan di tahun keduanya acara ini kembali menuai perhatian yang luar biasa dari peserta lomba.

STAN diwakili oleh tim yang terdiri atas Rahmad Karim Harahap, Fauziah Noor, dan Fadli M Nur berhasil menuai prestasi dalam perlombaan yang cukup bergengsi ini. Tentu ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi STAN, mengingat pada tahun sebelumnya STAN hanya berada di posisi kedua. Rahmad Karim Harahap (Rahmad) mengatakan bahwa perlombaan ini merupakan ajang yang baik bagi calon akuntan profesional untuk mengasah kemampuan dan pengetahuannya. Ada begitu banyak pengalaman positif yang bisa diraih melalui ajang seperti ini. Bagi Rahmad sendiri, ajang seperti ini perlu dilestarikan dan dikembangkan bagi generasi-generasi calon akuntan muda Indonesia, terutama bagi adik-adik kelas di STAN.

Senada dengan Rahmad, Fadli M Nur (Fadli) juga mengakui betapa pentingnya ajang-ajang seperti ini untuk dikembangkan di masa-masa mendatang. “Saya pikir tahun depan STAN punya kans yang lebih besar untuk kembali menjuarai turnamen ini. Kami melakukan proses kaderisasi dengan baik, dan jika ini berjalan sebagaimana mestinya, saya rasa kami bisa lebih siap untuk bersaing lagi tahun depan”, pungkas Fadli.



Foto: Dok. STAN

Pelatihan Dasar Seni Peran

Dalam rangka meningkatkan kualitas diklat dan sebagai sarana simulasi dalam melatih peserta diklat dalam menerapkan materi diklat di luar dari permasalahan teknis yang dihadapi, mulai tahun 2014 dilaksanakan minilab pada setiap diklat yang diselenggarakan. sebagai . Mendukung pelaksanaan minilab tersebut, perlu dipersiapkan pemain-pemain yang cakap dalam memerankan *role play* yang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan diklat. Para pemain tidak hanya perlu paham tentang peran yang akan dimainkan tetapi juga dapat menjiwai peran tersebut. Pusdiklat PSDM pada tanggal 24 Maret 2014 mengadakan Pelatihan dasar seni peran dengan mengundang aktor Mathias Muchus. Aktor Terbaik FFI tahun 1988 ini memberikan tips dan trik bagaimana menjiwai peran yang dimainkan dengan totalitas.



Foto: Dok. PSDM

Sosialisasi Implementasi PMK Nomor 37/PMK.012/2014

BPPK mengadakan Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Diklat Non-Gelar dan Pengukuran Peningkatan SDM Melalui Diklat yang telah ditetapkan di bulan Februari yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 di Aula BPPK Purnawarman ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, K.A. Badaruddin, serta perwakilan pejabat dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan.



Foto: Eros L. Mursalin

Transformasi Kediklatan

*BPPK bukan hanya penyelenggara diklat. BPPK lebih dari itu. BPPK bertanggungjawab dalam pengembangan sumber daya manusia keuangan dan kekayaan Negara. Tidak hanya pada *hardskill* (kemampuan teknis), tapi juga *softskill* (kemampuan non-teknis).*

Proses pengembangan sumber daya manusia salah satunya adalah melalui diklat. Diklat yang dilaksanakan BPPK saat ini bukan lagi diklat syarat', namun diklat yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan tuntutan kebijakan serta permasalahan yang terjadi.

Membenahi kualitas diklat merupakan syarat mutlak BPPK untuk terus berkembang. Kualitas diklat harus selalu dipantau, dievaluasi dan dikoreksi untuk menjaga dan mendorong peningkatan kualitas organisasi. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa implikasi pula pada penyelenggaraan diklat. Proses identifikasi dan memprediksi kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan menjadi jawaban dalam memberikan diklat yang benar-benar bermanfaat bagi unit pengguna.

Transformasi dilakukan agar BPPK dapat menyesuaikan diri dan bergerak cepat seiring dengan perubahan. Transformasi menuju diklat yang bermutu diawali dengan mengembangkan visi yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Keterlibatan unit eselon I di Kementerian Keuangan menjadi penting dalam pengembangan sistem kediklatan yang ada di BPPK. Perbaikan berkelanjutan dan selalu berupaya keras membuat produk diklat menjadi lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kompetensi (*hardskill*

dan *softskill*) yang diperlukan di Kementerian Keuangan.

Transformasi kelembagaan yang tengah digalakkan di Kementerian Keuangan perlu didukung oleh sumber daya yang handal, sehingga badan diklat dituntut untuk berperan serta. Kebutuhan pengembangan SDM menjadi makin tinggi, sekarang dan dimasa yang akan datang. Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian keuangan, bahwa kebijakan yang dikeluarkan institusi (Kemenkeu) bergulir dengan sangat cepat, BPPK juga harus mampu menyesuaikan diri dengan hukum dan produk layanan yang tersedia. Semua perubahan itu perlu disebarluaskan dan diinternalisasikan kepada semua pegawai di Kemenkeu.

BPPK, melalui beberapa Pusdiklat dan Sekretariat Badan, telah memperoleh pengakuan kualitas melalui ISO 9001:2008. ISO yang menitikberatkan pada mutu atau kualitas pelayanan dan manajemen organisasi ini dapat menjadi satu usaha maju BPPK menyikapi perubahan dan tuntutan pemangku kepentingan yang silih berganti hadir.

Diklat adalah bagian dalam proses transformasi. Seperti yang sedang terjadi di Kementerian Keuangan, transformasi kelembagaan mencakup juga transformasi personil nya. Secara luas, setiap personil di Kementerian Keuangan harus mampu menjawab tantangan, mencapai visi dan misi organisasi. Melalui diklat, transformasi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dan diakses, dan tertanam dalam setiap personil yang turut serta. Oleh karena itu, diklat memiliki posisi yang penting dalam rangka proses transformasi. Diklat berperan dalam menanamkan nilai-nilai dan kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu institusi.

Widyaiswara sebagai ujung tombak badan diklat, juga harus peka terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan institusinya berasal. Demikian halnya dengan

Foto: M. Fath

widyaiswara BPPK yang harus mau dan mampu untuk terus belajar, melihat, memperhatikan, memahami dan peka terhadap perubahan yang terjadi di Kementerian Keuangan. Peran widyaiswara saat ini diharapkan tidak semata menyampaikan materi kepada peserta diklat, tapi mampu memberikan pengertian lebih, “mentransformasi” materi yang diberikan. Para peserta diklat tidak hanya memahami tapi kritis dan turut berperan dalam mempraktekkan kemampuan (ilmu) yang telah diterima.

BPPK mengawali tahun 2014 dengan komitmen baru. Inisiatif strategis menjadi fokus BPPK di 2014 ini. Transformasi diklat yang didengungkan BPPK secara spesifik terdapat dalam Fokus Pengembangan kapasitas widyaiswara dan struktural, serta Penyempurnaan Program Diklat.

Widyaiswara yang menjadi garda terdepan BPPK akan makin dikuatkan posisinya. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun juga kualitas. Kompetensi yang dimiliki oleh widyaiswara BPPK akan makin ditingkatkan dan diperluas. Kebijakan mengenai penerima beasiswa yang telah lulus untuk berbagi ilmu yang telah diterimanya di BPPK menjadi suntikan positif bagi diklat di Kementerian Keuangan. Selain itu, kebijakan mengenai pejabat eselon I dan II di Kemenkeu yang harus mengajar juga memberikan stigma positif bagi BPPK. Berbagi ilmu menjadi satu bukti tanggungjawab atas ilmu yang telah diterima. Widyaiswara dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Selain widyaiswara (fungsional), pegawai struktural juga menjadi tumpuan BPPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pegawai struktural di lingkungan BPPK dituntut untuk mampu melaksanakan tugas *kediklatan* BPPK secara maksimal.

Seiring berjalannya waktu, BPPK tidak hanya mengemban tugas pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, tapi juga pengembangan *soft-competency* SDM Kemenkeu.

Pengembangan sumber daya Kemenkeu terfokus pada perubahan perilaku. Strategi pengembangan sumber daya manusia Kemenkeu juga tergantung pada sumber daya BPPK. Pengembangan kapasitas SDM Kemenkeu akan dilakukan secara menyeluruh sehingga kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dapat diminimalisir. Inisiatif strategi *Value Based HRM* mengangkat satu isu yang dapat mendorong terciptanya peningkatan kualitas diklat. *Coaching* dapat disampaikan oleh pejabat eselon II untuk pejabat-pejabat struktural maupun fungsional yang belum mempunyai kriteria *transformational leadership*. Para pejabat tersebut diharapkan mampu menjadi *role model* bagi pejabat lainnya. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dan monitoring untuk seluruh pegawai yang telah mengikuti diklat.

Pengembangan sumber daya manusia tidak terasa lengkap tanpa adanya program yang mampu mengakomodir kebutuhan SDM nya. Maka dari itu, melalui satu dari beberapa inisiatif strategis yang telah ditetapkan, BPPK

menetapkan perlunya Penyempurnaan Program Diklat dengan inisiatif strategis Pembangunan Program Akomodatif. Fokus kegiatan ini adalah dengan menyempurnakan program diklat yang telah ada serta menciptakan diklat baru yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kompetensi. Pembangunan program akomodatif akan menghasilkan program diklat yang berdampak tinggi (*output* dan *outcome*) dan program diklat yang akomodatif (*input* dan *proses*). Program yang berdampak tinggi akan menekankan poin strategis bagi unit pengguna, yang sifatnya mendesak (tahun depan atau tahun ini), serta memiliki dampak besar terhadap kinerja.

Transformasi sistem diklat secara fundamental diawali dengan mengidentifikasi berbagai strategi kebijakan yang lebih efektif dan inovatif bagi BPPK dalam mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang berkompetensi tinggi dan berintegritas mulia. Pengembangan sumber daya manusia Kemenkeu diawali dari BPPK dan akan terus dikelola dan dikembangkan oleh BPPK.

Fokus	Inisiatif Strategi
Harmonisasi Peraturan	Harmonisasi peraturan
Pengembangan kapasitas widyaiswara dan struktural	Pengembangan widyaiswara sebagai “frontliner”
	Value based HRM
IT Based Process Business	Pembangunan IT Based Proses Bisnis
Penyempurnaan Program Diklat	Pembangunan program akomodatif
Anggaran dan Infrastruktur	Penyempurnaan struktur penganggaran dan sarana prasarana

Tabel 1. Inisiatif Strategis.

Pembangunan Program Diklat Akomodatif



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Akomodatif” berarti mampu menyesuaikan diri. Perubahan itu adalah sesuatu yang terus dan pasti terjadi. Program diklat harus bersifat akomodatif, mampu menyesuaikan diri seturut kebutuhan pemangku kepentingannya.



Foto: Dok. BDK Malang

Unsur-unsur dalam diklat, seperti penyelenggara, peserta, dan widyaiswara/fasilitator, harus bersinergi satu dengan yang lain agar program diklat dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Keberhasilan penyelenggaraan diklat tidak hanya ditentukan oleh peran penyelenggara diklat yang handal, tapi juga mampu memberikan pengetahuan, pengalaman dan peningkatan kompetensi yang diharapkan. Tidak hanya orangnya (sumber daya manusia), namun program diklat atau kurikulum diklat juga menjadi syarat utama agar diklat dapat berjalan dengan baik serta mampu mencapai tujuan.

Berbagai persiapan yang berkaitan dengan keberhasilan peningkatan kualitas SDM Kemenkeu membutuhkan perencanaan yang matang. Identifikasi Kebutuhan Diklat (*Training Need Analys*) atau disingkat dengan IKD/ TNA adalah alat dalam menggali kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) BPPK untuk mengetahui secara mendalam kebutuhan diklat dari masing-masing unit (eselon I Kemenkeu). Hasil TNA tersebut adalah dasar bagi masing-masing Pusdiklat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program diklat yang disusun. Ketidaktepatan proses identifikasi kebutuhan atau tidak dijalankannya proses ini berakibat diklat tidak akan menghasilkan hal yang positif baik bagi peserta diklat dan bagi unit pengirim peserta. Dengan terbitnya PMK Nomor 37/PMK.012/2014 tentang Pedoman IKD Non-Gelar di lingkungan Kementerian Keuangan maka alur, proses dan keterlibatan seluruh elemen (unit eselon I dan Biro SDM Kemenkeu) makin jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. BPPK mengetahui kebutuhan diklat dari seluruh unit pengguna (eselon I Kemenkeu). Selanjutnya, BPPK (melalui Pusdiklat) menggali lagi kebutuhan diklat tersebut, mengidentifikasi program diklat yang tepat, mulai dari persiapan, penyelenggaraan hingga evaluasi diklat.

Pada tahun 2014, BPPK mengusung isu

Diklat adalah salah satu syarat utama dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kemenkeu. Program diklat dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur agar memiliki kompetensi dan

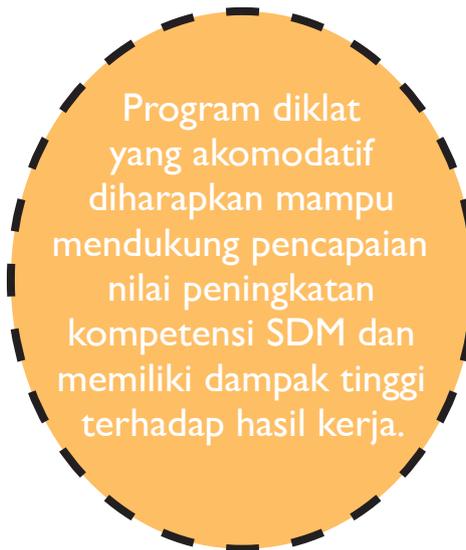
kemampuan sesuai tuntutan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Tuntutan masyarakat agar PNS menjadi birokrat yang profesional, adalah tuntutan Kemenkeu terhadap BPPK.

Pembangunan Program Diklat yang Akomodatif sebagai salah satu inisiatif strategis BPPK. Inisiatif strategi ini menitikberatkan pada pengembangan penyusunan program diklat yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan SDM Kemenkeu. Beberapa hal yang diangkat dalam isu ini adalah penyusunan dan pelaksanaan program diklat yang mendukung pencapaian nilai peningkatan kompetensi SDM dan program diklat berdampak tinggi. Inisiatif strategis tersebut dibahas dalam Komisi Pembangunan Program Akomodatif. Komisi ini bertugas menyusun pedoman kediklatan di BPPK yang nantinya akan mendukung pencapaian peningkatan SDM Kemenkeu.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program diklat yang mendukung pencapaian nilai peningkatan kompetensi SDM antara lain:

1. Mengidentifikasi diklat dan peserta yang akan diukur kompetensinya.
 - a. Diklat strategis adalah diklat yang:
 - (1) Menjadi prasyarat bagi pegawai untuk melaksanakan suatu tugas, fungsi atau jabatan tertentu;
 - (2) Secara langsung mendukung tugas dan fungsi organisasinya, ini biasanya berupa diklat spesialisasi;
 - (3) Penempatan atau pemanfaatan lulusan, minimal sejumlah 30% sudah sesuai dengan pengetahuan maupun keterampilan yang telah diperoleh dari diklat yang diikuti.
 - b. Diklat dan peserta yang akan diukur kompetensinya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (1) Diutamakan diklat dengan peserta homogen (berasal dari eselon I yang sama);

- (2) Spesifik (peserta sudah berada dalam jabatan);
 - (3) Diutamakan bukan merupakan diklat penyegaran maupun diklat lanjutan;
 - (4) Diklat yang memiliki tujuan sesuai dengan kriteria C3 pada Taksonomi Bloom (mampu menerapkan/mengaplikasikan);
 - (5) Pegawai yang akan dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-assessment dibawah 60.
2. Menyusun/mereviu kurikulum (KAP, GBPP, SAP/teaching manual) program diklat. Hasil review



- kurikulum menjadi bahan dalam penyusunan tools pre dan post assessment.
3. Menyusun materi pembelajaran untuk pendidikan dan pelatihan. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang sudah direviu, yang bersifat variatif (modul, bahan tayang, role play, mini lab).
 4. Menyusun *tools pre* dan *post assessment*.
 - a. Melaksanakan *pre* dan *post assessment*. Metode yang digunakan adalah dengan survey

360° dan dilaksanakan sebelum dan sesudah diklat. Teknis pengukurannya dilakukan dalam dua fase:

- (1) Pertama adalah leveling kompetensi awal dengan menggunakan pre-assessment melalui metode survey 360°. Pegawai yang akan dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-assessment dibawah 60.
- (2) Kedua adalah leveling kompetensi akhir, menggunakan metode yang sama. Kegiatan ini secepat-cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah peserta kembali bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari diklat yang diikuti.

Sasaran yang saat ini akan dicapai oleh Komisi Pembangunan Program Akomodatif adalah membuat piloting program diklat berdampak tinggi. Menurut komisi ini, diklat yang berdampak tinggi adalah diklat yang memberikan dampak nyata terhadap hasil kerja. Kriterianya antara lain: strategis bagi unit pengguna, bersifat mendesak (tahun depan atau tahun ini), berpengaruh nyata terhadap kinerja Kementerian Keuangan, diarahkan langsung oleh manajemen puncak dan memakan waktu lebih besar atau sama dengan 100 jamlat.

Program diklat akomodatif merupakan pengembangan dari program diklat yang selama ini berjalan di BPPK. Melalui banyak masukan, BPPK memperbaiki dan mengembangkan diri. Program diklat akomodatif adalah hasil buah pemikiran dan masukan yang diterima BPPK, diharapkan mampu menjawab tantangan yang datang. Program diklat yang akomodatif diharapkan mampu mendukung pencapaian nilai peningkatan kompetensi SDM dan memiliki dampak tinggi terhadap hasil kerja.



Foto: Dok. Bagian TIK

Penerapan *Independent Study* di Pusdiklat Keuangan Umum

Pola belajar secara independent study mungkin masih terasa asing di telinga kita. Namun pola belajar independent study sendiri telah banyak dilakukan di luar negeri. Melihat efektivitas dan efisiensinya, Pusdiklat Keuangan Umum yang dipimpin oleh Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Tony Rooswiyanto, mulai mengadaptasi kegiatan diklat ini. Berikut adalah penjelasan Kapus Keuangan Umum ini mengenai Independent Study yang telah berjalan di Pusdiklat Keuangan Umum.

Apakah pengertian dan latar belakang penyelenggaraan metode diklat independent study?

Jawaban:

Metode diklat *independent study* adalah metode diklat yang memberikan derajat kebebasan, tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar kepada peserta diklat dalam merencanakan

dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajarnya (Wedemeyer, 1973). Istilah *independent* menegaskan bahwa kendali belajar serta keluwesan waktu maupun tempat belajar terletak pada peserta diklat yang mengikuti diklat *independent study* tersebut.

Latar belakang penyelenggaraan metode diklat *independent study* adalah untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan diklat dengan metode reguler, misalnya kesibukan peserta diklat, waktu diklat yang cukup lama, perbedaan kemampuan/kompetensi awal dari peserta diklat (ada yang sudah pada tahap menengah, ada yang masih tahap dasar), serta kendala geografis dan biaya. Termasuk dalam kendala biaya adalah keterbatasan kuantitas peserta untuk pelaksanaan diklat model reguler. Di BPPK pada umumnya ditetapkan batas minimal peserta sebelum diklat dapat dilaksanakan yaitu sekitar minimal 15 peserta. Lebih efisien jika peserta diklat kurang 15 untuk diselenggarakan secara *independent study*.

Apa yang membedakan *independent study* dengan metode pembelajaran lainnya?

Jawaban:

Perbedaan *independent study* dengan diklat reguler, pada *independent study* peserta tidak masuk kelas, mereka mendapat tujuan diklat dan target waktu penyelesaian diklat dari panitia diklat, namun bagaimana kegiatan belajarnya ditentukan oleh peserta diklat sendiri. Bahkan pada diklat *fully independent study*, kurikulum diklat (yaitu khususnya cara mencapai kompetensi, materi, dan referensi) ditentukan sendiri oleh peserta diklat.

Sedangkan perbedaan *independent study* dengan *e-learning* dapat dikatakan bahwa *independent study* adalah istilah jenis cara/metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta diklat, sementara *e-learning*

adalah istilah jenis metode *delivery* penyampaian materi diklat kepada peserta, yaitu melalui elektronik (*on-line learning*). Jadi kedua istilah tersebut membicarakan dua hal yang berbeda. Suatu metode *independent study* dapat di-*delivery* secara *e-learning*, namun dalam *independent study* peserta harus memiliki kebebasan kapan belajar, sampai seberapa jauh belajar, bahkan materi pembelajaran dan referensi apa lagi yang harus ditambahkan. *E-learning* dapat juga diselenggarakan tanpa harus dengan pembelajaran *independent study*.

Bagaimana tahap-tahap penerapan metode *Independent Study* pada Pusklat Keuangan Umum?

Jawaban:

Metode diklat *independent study* masih dalam tahap persiapan pada Pusklat Keuangan Umum. Metode ini pertama digagas pada tahun 2013. Saat itu kita sebut Persiapan Tahap I, yaitu tahap survey minat *independent study*. Pada tahap ini kami mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah terdapat potensi calon peserta diklat dengan metode *independent study*, artinya kami ingin mengetahui seberapa besar minat calon peserta dengan diklat model baru ini, serta pada bidang-bidang keilmuan apa saja diklat *independent study* tersebut diminati. Pada tahun 2014 ini kita sebut dengan memasuki tahap pengembangan diklat yang akan disampaikan secara *independent study*. Hasil tahap I menunjukkan *independent study* mendapat respon positif dari calon peserta. Oleh karena itu pada tahun 2014 ini perlu dikembangkan diklat yang akan diselenggarakan secara *independent study*.

Sebagai gambaran, pada tahun ini kami melihat, yang belum terlihat pada tahap survey minat pada tahun lalu, yaitu bahwa peluang pelaksanaan *independent study* ini terdapat pada bidang-bidang keilmuan yang secara internasional

atau nasional terdapat standardisasi kompetensinya, yaitu terdapat ujian sertifikasinya. Misalnya untuk keahlian menggunakan MS Office, Microsoft mengeluarkan sertifikasi MS Office. Atau keahlian tentang penanganan jaringan komputer, terdapat sertifikasi dari CISCO atau CCNA. Atau keahlian audit terdapat sertifikasi auditor pemerintah (CGAP) atau audit sistem komputer terdapat sertifikasi CISA. Yang sangat akrab dengan kita ada juga, misalnya ujian TOEFL. Kita bisa siapkan peserta untuk melakukan *independent study* atas bidang-bidang yang memiliki sertifikasi standar tersebut. Pada awal pendaftaran, peserta akan diuji pada tahap mana kemampuan/skill di bidang tersebut. Untuk peserta-peserta yang sudah mempunyai tingkat kemampuan level tertentu dan diprediksi dia akan dapat membekali diri sendiri secara *independent* untuk meningkatkan kemampuannya, kenapa tidak kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan *independent study*. Di akhir proses kita fasilitasi dan biayai pelaksanaan ujian sertifikasinya. Kami kira ini memungkinkan. Sebagai gambaran untuk mengikuti ujian TOEFL, peserta harus membayar sekitar Rp 1.200.000,00. Jika kita melihat ada pegawai Kementerian Keuangan yang dapat mencapai skor TOEFL, misal 600 dari start awal kemampuan misal 540, kita bisa janjikan pembiayaan mengikuti ujian TOEFL kepada mereka melalui mekanisme diklat *independent study*.

Diklat apa sajakah yang (direncanakan) akan menggunakan metode *Independent Study*?

Jawaban:

Pada dasarnya semua diklat dapat diselenggarakan dengan pembelajaran secara *independent study*. Namun kita lihat karakteristiknya, kalau bidang keilmuan diklat tersebut tidak terlalu dalam, artinya dengan mengikuti diklat reguler saja bidang tersebut sudah dapat dikuasai, maka untuk bidang tersebut tidak perlu dilakukan *independent study*.

Namun kalau bidang keilmuan tersebut cukup dalam, sehingga tidak cukup diberikan dalam satu diklat tapi harus dilakukan dalam berseri-seri diklat (misal diklat dasar, menengah, lanjutan), padahal belum tentu semua peserta start pada level kemampuan yang sama, serta belum tentu semua dapat menyelesaikan keseluruhan serial diklat tersebut, kenapa tidak kita selenggarakan saja diklat tersebut dengan metode *independent study*. Contohnya seperti yang telah disinggung di atas tadi, yaitu diklat TOEFL atau IELTS, sertifikasi MS Office, sertifikasi CCNA, sertifikasi CISA dan lain-lain.

Bagaimana stakeholder memandang metode *independent study* pada Pusdiklat Keuangan Umum?

Jawaban:

Hasil survey minat *independent study* yang kami selenggarakan tahun 2013 lalu cukup menggembirakan. Kami membagi pertanyaan survey kepada tiga kategori besar topik yang ingin kami ketahui, yaitu kemampuan melaksanakan proses *independent study*, minat mengikuti *independent study*, serta ranah kompetensi yang diminati dengan *independent study*. Pada kategori pertama, pada umumnya responden mengkonfirmasi positif kemampuan mereka melakukan proses belajar mandiri, dari mulai kemampuan menggunakan internet untuk mendapat bahan materi yang relevan, kemampuan mencari referensi di Perpustakaan, kemampuan menyusun strategi pembelajaran sendiri, kemampuan mengevaluasi sendiri dan lain-lain, pada umumnya signifikan mampu mereka lakukan. Tentang minat mengikuti, 65% responden menyatakan berminat. Jadi cukup terbuka peluang dan cukup dibutuhkan. Tentang ranah minat, meliputi bidang-bidang seperti bahasa Inggris, komputer dan data keuangan, serta manajemen.

Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan metode pembelajaran

ini?

Jawaban:

Sebagai metode baru, kendala terbesar tentunya adalah bagaimana menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan diklat dengan metode *independent study* ini. Ini mencakup paket pembiayaan, berkas-berkas administrasi yang diperlukan, seleksi peserta, keterlibatan widyaiswara dan lain-lain.



Apakah metode ini juga dapat diaplikasikan ke seluruh Pusdiklat di BPPK?

Jawaban:

Kami optimis metode ini juga dapat diselenggarakan di Pusdiklat lain di BPPK. Meskipun secara jujur mungkin dapat kami sampaikan pula, Pusdiklat kami, yang menangani bidang keilmuan cukup beragam, memang pada posisi harus mencari model lain untuk menjangkau semua potensi peminat diklat, jangan sampai yang kami dapat jangkau hanya dari yang berkemampuan rata-rata untuk ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Untuk yang berkemampuan sudah tinggi umumnya belum dapat memberikan tawaran pengembangan keterampilan lebih lanjut, karena jumlahnya pada umumnya sedikit tidak mencukupi batas minimal diklat satu kelas.

Kami berpikir misalnya di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang selama ini menyelenggarakan diklat Pengadaan Barang dan Jasa, yang begitu cukup banyak peminatnya, dapat juga menyelenggarakan diklat tersebut dengan metode *independent study* tersebut. Jadi dalam kasus ini *independent study* juga dapat menjadi solusi untuk diklat-diklat yang justru peminatnya cukup banyak. Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, yang juga akan segera digulirkan LKPP, juga kami kira nantinya dapat diselenggarakan dengan metode *independent study* ini.

Kita tidak boleh kalah dengan instansi-instansi lain di luar BPPK, di Indonesia ini, yang telah menerapkan *independent study*, seperti: Universitas Pendidikan Indonesia (beberapa mata kuliah, contohnya di jurusan olahraga, diselenggarakan dengan *independent study*), Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI) yang dahulunya Sampoerna School of Education (SSE) yang bertetangga dengan Pusdiklat Keuangan Umum juga telah menyelenggarakan *independent study* untuk diikuti mahasiswa mereka, juga Universitas Terbuka sebagaimana kita ketahui sampai tingkat tertentu juga telah menyelenggarakan *independent study*, dan organisasi-organisasi lainnya.

Bagaimana harapan Saudara dengan penggunaan metode *independent study* di BPPK?

Jawaban:

Kami berharap kami dapat menyelenggarakan model ini dengan mulus, baik dan dirasakan benar manfaatnya, terutama sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus pada tingkat yang cukup tinggi.



Foto: M. Fath K.

Penilaian yang Bukan Hanya Sekedar Melakukan Penilaian

Indonesia, negara yang satu ini mempunyai kekayaan negara yang luar biasa, sumber daya alam salah satunya. Pengelolaan kekayaan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan suatu keahlian khusus agar pengelolaan tersebut dapat dengan tepat dilakukan. Selain kekayaan sumber daya alam, Pemerintah juga memiliki kekayaan yang lainnya, yaitu aset fisik, bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Aset tersebut tersebar di seluruh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga publik, dan pemerintah daerah. Hal yang demikian biasa disebut dengan Barang Milik Negara (BMN).

Proses penilaian terhadap aset atau BMN tersebut merupakan salah satu langkah awal dari pengelolaan kekayaan tersebut. Penilaian yang tepat sangat dibutuhkan mengingat potensi kekayaan negara sedemikian besar sehingga menuntut sebuah instrumen yang tepat pula untuk mengukurnya. Kegiatan penilaian ini dilakukan untuk, salah satunya, dalam rangka penyusunan neraca pemerintah yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah. “Penilai Pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang transparan dan akuntabel. Opini nilai wajar atas suatu aset yang dikeluarkan penilai

pemerintah menjadi penting, karena digunakan sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan”, demikian bagian poin penting penyampaian Menkeu, M. Chatib Basri dalam sebuah kesempatan Rakernas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

Salah satu misi DJKN yaitu mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum serta mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. Sejalan dengan hal tersebut, tentunya dibutuhkan para petugas penilai dan pengelola kekayaan yang cakap

dan handal. Untuk itulah Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan atau biasa disebut dengan Pusdiklat KNPk, salah satu unit eselon II dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, menyediakan pendidikan dan pelatihan yang khusus di bidang penilaian. Beberapa diklat dirancang secara khusus berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diklat terkait dengan proses penilaian untuk berbagai sektor. Pusdiklat KNPk dan DJKN bekerja sama dalam merancang diklat penilai sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari setiap petugas penilai yang ada di direktorat unit eselon I yang baru lahir pada tahun 2006 ini. Beberapa diantaranya adalah diklat penilaian properti, bisnis, usaha, sumber daya alam, minyak dan gas bumi, batubara serta sumber daya hutan.

Kurikulum pada setiap jenis diklat penilaian disesuaikan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap penilai yang akan melakukan penilaian pada sektor-sektor tersebut. Begitu luasnya pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh penilai, membuat diklat ini juga dirancang dengan pendekatan *levelling*, maksudnya ada penjenjangan diklatnya yaitu dasar dan lanjutan. Pada diklat penilaian properti misalnya, pada level dasar diberikan konsep dasar penilaian, analisis pasar properti dan beberapa metode melakukan penilaian dengan beberapa pendekatan. Untuk level lanjutan, sudah dimasukkan unsur-unsur analisa yang lebih mendalam dari metode-metode tadi, disamping ada materi untuk penilaian terhadap objek khusus dan kemampuan untuk melakukan review atas laporan penilaian. Sebagaimana telah disampaikan, diklat yang berdurasi lebih dari 3 minggu ini, sangat kaya akan materi dan proses *transfer knowledge* berlangsung dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang interaktif dan penuh dengan diskusi serta keaktifan peserta diklat.

Penilaian terhadap sektor usaha dan bisnis tidak luput dari perhatian Pusdiklat

KNPK sebagai lembaga penyedia diklat pada bidang kekayaan negara ini. Materi yang disajikan sangat beragam, mulai dari konsep penilaian bisnis, pengantar pasar modal, dasar keuangan perusahaan, analisis prospek perusahaan dan lain-lain yang terkait dengan bisnis yang dilakukan perusahaan. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada paragraf awal tulisan ini, bahwa selain aset yang berupa barang milik negara secara fisik, potensi kekayaan yang dikuasai negara juga berasal dari sumber daya alam. Materi-materi terkait pemenuhan kompetensi pengetahuan atas pengelolaan dan penilaian sumber daya alam dirangkum dan dikemas dalam sebuah diklat penilaian yang diberi tajuk Diklat Penilaian Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam yang dijadikan objek penilaian adalah Minyak Bumi, Gas Bumi, Panas Bumi, Mineral, Batubara dan Hutan.

Sama halnya dengan diklat properti, penilaian terhadap sumber daya alam ini begitu luas, sehingga untuk model pelatihan diberikan diklat dasar penilaian sumber daya alam yang membahas bagaimana konsep penilaian terhadap beberapa objek penilaian sumber daya alam. Untuk menyampaikan materi secara tepat dan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang dapat dikuasai peserta diklat, maka pelatihan ini diberikan dalam waktu 2 minggu. Khusus untuk minyak dan gas bumi, batubara dan hutan, penilaian terhadap objek tersebut membutuhkan pendalaman dan spesialisasi. Sebagai lembaga peningkatan kapasitas pegawai, Pusdiklat KNPk menciptakan diklat khusus untuk materi tersebut dengan durasi diklat lebih singkat namun padat dan tepat sasaran.

Semua diklat tersebut ditujukan untuk para pegawai di lingkungan DJKN, Kemenkeu, khususnya para penilai atau yang akan menjadi penilai. Spesifikasi peserta yang tepat akan menghasilkan diklat yang tepat guna dan efektif, sehingga peran Pusdiklat KNPk menjadi sangat strategis bagi peningkatan kompetensi SDM penilai di DJKN Kement-

rian Keuangan. Semua jenis pelatihan penilaian, selain proses pembelajaran di kelas, juga menggunakan model praktek langsung ke lapangan (PKL) sesuai dengan objek penilaian. Pulau Borneo, Kalimantan, tidak luput dari target Pusdiklat KNPk sebagai lokasi yang disiapkan untuk praktek kerja para peserta diklat, khususnya untuk diklat penilaian batubara, agar didapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengukur kemampuan peserta diklat, selain praktek kerja lapangan, juga dilakukan pengukuran melalui tes / ujian yang berupa kasus-kasus penilaian yang telah dipelajari. Tes tersebut tidak bermaksud untuk memberikan "ujian" bagi peserta, namun lebih ke arah mempersiapkan peserta diklat agar benar-benar siap pada saat mereka kembali ke unit kerja masing-masing. Sebagai pengajar, para Widyaiswara Pusdiklat KNPk dan tim teknis dari DJKN serta melibatkan juga praktisi penilai dari kalangan akademisi dan bisnis, saling bahu membahu untuk memberikan yang terbaik kepada peserta diklat.

Saat ini Pusdiklat KNPk telah memiliki materi-materi penilaian yang dikemas dalam bentuk multimedia, dan terus akan disusun untuk materi lainnya sebagai bentuk dukungan proses pembelajaran mandiri dan memberikan efek perluasan pembelajaran secara massal.

Setelah diklat berakhir dan peserta kembali ke unit organisasi masing-masing, tugas Pusdiklat KNPk belum berakhir dan tidak akan berakhir. Evaluasi pasca diklat dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan diklat dan untuk menyempurnakan diklat yang akan datang, begitu seterusnya, sehingga tugas mulia ini memang tidak akan pernah berakhir untuk sebuah kesempurnaan.



Foto: Dok. Puduklat PSDM

Kompetensi Khas, yang Khas dari Jurangmangu

Pegawai adalah aset organisasi, SDM adalah mesin yang menggerakkan sebuah kendaraan. Istilah tersebut seringkali kita dengar maupun kita baca pada beberapa seminar, materi mengenai peranan pegawai atau SDM dalam sebuah organisasi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selain metode kerja, prosedur, dan peraturan, dalam menjalankan roda organisasi, SDM memegang peranan penting untuk menggerakkan organisasi agar berjalan

sesuai dengan yang diinginkan. Kemampuan para pegawainya sangat dominan untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam banyak literatur, kemampuan, keterampilan dan perilaku seseorang yang harus dimiliki untuk mengerjakan sesuatu sering disebut dengan istilah Kompetensi.

Dalam organisasi Kementerian Keuangan, kompetensi sudah diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan yang menjelaskan kebutuhan dan

tingkat kompetensi yang harus dipenuhi setiap pegawai dalam masing-masing jabatannya. Adanya Kamus Kompetensi yang merumuskan hal tersebut, mau tidak mau, menjadikan kompetensi sebagai salah satu unsur wajib yang harus dimiliki setiap pegawainya. Secara khusus, kamus kompetensi di Kementerian Keuangan terbagi menjadi tiga kelompok kompetensi, yaitu kelompok kemampuan berpikir, kelompok kemampuan penyelesaian tugas, dan kelompok kemampuan

KLUSTER KOMPETENSI

THINKING	WORKING	RELATING
<ul style="list-style-type: none"> • Visioning or Innovation • In-Depth Problem Solving & Analysis or Decisive Judgment • Championing Change or Adapting to Change • Courage of Convictions • Business Acumen • Functional Acumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Planning and Organizing • Driving For Results or Delivering Results • Quality Focus or Continuous Improvement or Policies, Processes and Procedures • Safety • Stakeholder Focus or Stakeholder Service • Integrity • Resilience • Continuous Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • Team Work and Collaboration • Influencing & Persuading • Managing Others or Team Leadership • Coaching and Developing • Motivating Others • Organizational Savvy or Relationship Management • Negotiation or Conflict Management • Interpersonal Communication • Written Communication • Presentation Skill • Meeting Leadership or Meeting Contribution

Kluster Kompetensi Kementerian Keuangan

hubungan antar manusia. Ketiga kelompok kemampuan tersebut mutlak diperlukan bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tingkatan jabatan dan jenis jabatannya.

Pemenuhan dan pengembangan kompetensi bagi seorang pejabat, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dilaksanakan secara berkesinambungan melalui sebuah program pelatihan yang didesain khusus. Adalah Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) BPPK, yang mengemban tanggung jawab untuk itu. Beberapa pelatihan tersebut menjadikan kompetensi sebagai menu utama dalam kurikulumnya. Diklat Kompetensi Khas (DKK), adalah nama diklat yang dipilih untuk mengisi dan mengembangkan kemampuan dan perilaku pegawai dalam hal berpikir, penyelesaian tugas dan hubungan antar manusia.

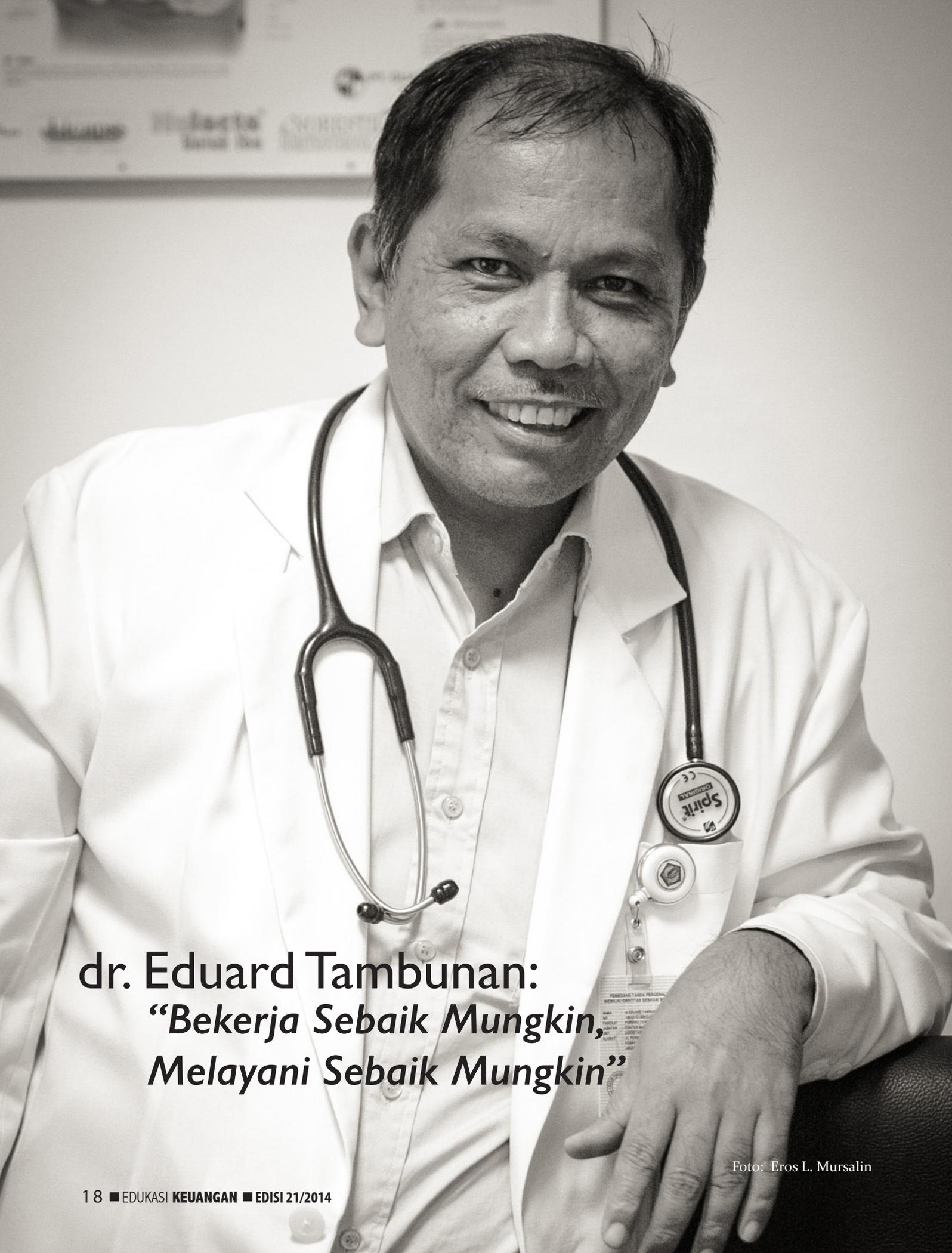
Pada DKK, kurikulum dirancang sesuai dengan kamus kompetensi pada level jabatan tertentu, dan pada kompetensi spesifik yang ingin dicapai. Kreatifitas dan Inovasi, misalnya, merupakan salah satu kemampuan spesifik yang ingin diberikan kepada para peserta diklat. Walaupun pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, namun pada

program diklat ini, Pusdiklat mencoba menggali kembali potensi optimal yang sebenarnya ada pada diri setiap peserta diklat. Pada diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat yang berlokasi di daerah Jurangmangu Tangerang Selatan ini, para trainer dan peserta saling berdiskusi dan dengan sengaja oleh Pusdiklat, diciptakan beberapa tantangan bagi peserta diklat untuk berpikir kreatif dan inovatif. Pada intinya diklat ini tidak hanya memberikan konsep, namun bagaimana mengimplementasikan berbagai konsep pemikiran yang ada di kepala peserta diklat menjadi nyata, begitulah yang penulis tangkap dari obrolan dengan Boy Azhar, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pusdiklat PSDM terkait dengan diklat ini.

Motivasi, Coaching dan Mentoring, Kepemimpinan adalah beberapa diklat yang dikategorikan sebagai Diklat Kompetensi Khas di Pusdiklat PSDM. Para peserta yang mengikuti diklat ini berasal dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Keterlibatan unit kepegawaian dari masing-masing unit eselon I yang ikut memantau perubahan perilaku dan kemampuan peserta setelah mengikuti diklat ini, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi ini menjadi perhatian penting semua pihak. Pemantauan tersebut melalui

perangkat Rencana Pengembangan Kompetensi yang wajib diisi oleh peserta sebagai rencana aksi setelah mengikuti diklat. Tidak hanya unit kepegawaian saja yang “ikut” diklat, namun juga pada semua jenis DKK, rekan peserta diklat, bawahan dan atasan juga “ikut” dalam hal memberikan penilaian perilaku bagi peserta diklat secara langsung. Proses tersebut dinamakan pengukuran 360^o untuk mengetahui pengukuran pribadi peserta dan menurut pengamatan langsung dari rekan sekelilingnya di kantor masing-masing. Dengan menggunakan pengukuran secara online, setelah diklat berakhir, selain sertifikat dan ilmu yang diperoleh, peserta juga diberikan hasil pengukuran objektif yang didapat dari model pengukuran 360^o tadi. “Keren juga, selain tambah ilmu, saya bisa mengetahui pengamatan teman-teman di kantor tentang kompetensi dan perilaku saya lewat kuesioner 360^o, kalo diklat lain belum ada”, ungkap Wawan Ismawandi, alumni DKK Coaching dan Mentoring.

Dengan penyampaian materi pokok oleh trainer atau pengajar yang kompeten dari Pusdiklat PSDM, ditambah praktek langsung penerapan kompetensi khas, yang disini disebut minilab, serta ditunjang juga dengan penyampaian *sharing experience* langsung dari praktisi atau pakar di luar Kemenkeu membuat DKK ini selalu menjadi pelatihan yang selalu diingat oleh peserta diklat. Banyaknya praktek, *role play*, simulasi, minilab, membuat diklat yang biasanya berlangsung antara 4-5 hari ini terasa begitu cepat dilalui oleh peserta. “Kedepannya, akan lebih banyak jenis kompetensi spesifik yang akan dikemas dalam DKK di Pusdiklat PSDM, penyempurnaan model pembelajaran dan standardisasi konten akan menjadi perhatian kami di Pusdiklat PSDM agar diklat ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi”, kata Boy Azhar menutup obrolan dan diskusi kami.



dr. Eduard Tambunan:
***“Bekerja Sebaik Mungkin,
Melayani Sebaik Mungkin”***

Foto: Eros L. Mursalin

“.....Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.....”

Penggalan diatas adalah isi dari Sumpah Dokter Indonesia yang diucapkan ketika pelantikan menjadi dokter. Prinsip itu pula yang dipegang oleh dr. Edu, pejabat fungsional kesehatan di BPPK, yaitu *Bekerja Sebaik Mungkin, Melayani Sebaik Mungkin*.

Ditemui disela-sela kesibukannya sebagai pejabat fungsional kesehatan, pria yang memiliki nama lengkap Eduard Tambunan ini menceritakan tentang masa kecilnya yang dihabiskan di Medan hingga menjelang kelas VI SD. Menjadi seorang dokter ternyata bukan cita-cita awalnya, Eduard kecil ingin menjadi pedagang. “Dulu sewaktu kecil saya suka melihat pedagang yang sedang menagih utang. Pikir saya, enak juga *tuh*, gampang dapet duitnya. Makanya saya bercita-cita menjadi pedagang”, ungkapnya. Titik balik terjadi ketika sang ibu disusul dengan saudara-saudaranya terkena penyakit. Ia memutuskan untuk menjadi dokter.

Perjalanan karir pria lulusan FKUI ini dimulai dengan menjadi dokter di Rumah Sakit Pringsewu, Lampung. “Sebelum itu, setelah tamat saya pernahlah iseng-iseng untuk praktek di klinik 24 jam sambil menunggu penempatan”, kenangnya. 6 bulan di RS Pringsewu, ia dipindahkan ke Puskesmas Adiluwih dan Puskesmas Palas sebagai Kepala Puskesmas. Selepas malang melintang di beberapa puskesmas, pria yang akrab disapa dr. Edu ini mengambil program spesialis

orthopedi di FKUI. “Sempat jalan dua tahun, tapi gak selesai”, ungkapnya. Takdir kembali membawanya ke puskesmas, kali ini wilayah kerjanya di ibukota. Pada tahun 1999, dr. Edu mendengar kondisi bahwa di BPPK belum ada dokter tetap. Ia melamar untuk mengisi posisi tersebut dan perjalanan karirnya di BPPK pun dimulai.

Praktek di Poliklinik BPPK

“Lebih banyak sukanya *yah*”, jawabnya ketika ditanya suka duka selama lima belas tahun mengabdikan di BPPK. dr. Edu berprinsip selalu menerima, mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan, melayani dengan sebaik mungkin. Berbeda dari pengalamannya dulu ketika di puskesmas dan di rumah sakit, kini ia bertugas pada penanganan awal pasien. “Contohnya penyakit jantung. Di rumah sakit, kita menerima kondisi pasien yang lebih parah. Kalau disini, bila kedatangan pasien penyakit jantung biasanya kita hanya melakukan penanganan awal, setelah itu kita rujuk ke rumah sakit”, jelasnya.

Selain poliklinik di Sekretariat, dr. Edu juga berpraktek di klinik Pusdiklat Keuangan Umum, Pancoran. Di beberapa kesempatan, dr. Edu juga dilibatkan dalam kegiatan diklat, seperti pendampingan peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) III dan IV yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PSDM. Dalam mendampingi peserta Diklatpim, dr. Edu berusaha sebisa

mungkin agar para peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan outbond dengan baik dan lancar. Apabila ada peserta yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak bisa mengikuti kegiatan luar ruangan yang memerlukan gerak badan dan fisik, tetapi peserta tersebut memiliki semangat yang tinggi, maka iapun bersedia untuk mendampingi. “Waktu itu sempat ada yang menderita tumor hati, sudah cukup besar tumornya, tetapi ia memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti outbond di Citarik. Saya dampingi, apabila ada kegiatan yang si pasien itu tidak sanggup ya saya informasikan ke instrukturinya. Syukurnya sampai saat ini kegiatan luar seperti outbond itu bisa berlangsung dengan mulus”, ceritanya.

dr. Edu juga dilibatkan dalam rekrutmen PNS serta Ujian Saringan Masuk (USM) STAN. Khususnya pada tes kesehatan dan kebugaran. Terkait urgensi tes kesehatan tersebut, dr. Edu berpendapat bahwa itu merupakan kebutuhan organisasi. Ketika tes, para pelamar tersebut diperiksa jantung dan beberapa organ lain. Bila terdeteksi ada gangguan, maka pelamar tersebut tidak diluluskan, karena pelamar tersebut dipastikan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. “Kalau ada yang tidak lulus itu biasanya karena ada gangguan di jantungnya, di paru-paru, atau ada trauma, bekas jatuh misalnya”, ungkapnya. Lain hal dengan pelamar yang sedang hamil, biasanya tetap diluluskan, tetapi hasilnya mungkin kurang maksimal pada tahap selanjutnya.

Jabatan Fungsional Kesehatan di Lembaga Pemerintah

Terkait jabatannya sebagai fungsional kesehatan, dr. Edu menyebutkan dua fungsi yang dijalankannya. Fungsi yang pertama adalah penanganan pertolongan pertama, seperti yang dilakukan oleh para dokter di puskesmas. “Karena tidak semua hal bisa langsung ditangani oleh rumah sakit, ada penanganan pertama”, ujarnya. Fungsi yang kedua adalah penyuluhan. Penyuluhan bisa dilakukan secara berkelompok atau juga secara tidak



Foto: Eros L. Mursalin

langsung. Materi yang disampaikanpun beragam, seperti tentang tingkah laku, gizi, ataupun psikologi.

Pada prakteknya, dr. Edu menyampaikan materi penyuluhan secara tidak langsung agar tidak terkesan menggurui. Salah satu kegiatan penyuluhan yang dilakukannya adalah dengan mensosialisasikan larangan merokok. “Kalau kita larang langsung, ya bisa marah mereka”, ungkapnya. Materi penyuluhan disampaikan dengan menggunakan poster.

Menjalani karir sebagai tenaga kesehatan di lembaga pemerintahan memiliki beberapa keuntungan dan tantangan tersendiri. Salah satu kelebihanannya adalah lokasi kerja yang selalu di kota besar dan tidak perlu menjalani jaga malam. Tantangannya adalah menurunnya kapasitas ilmu kedokteran yang dimilikinya. Oleh karena itu, dr. Edu menyarankan untuk rajin-rajin memperbaharui pengetahuan, baik dengan mengikuti seminar atau membaca buku atau artikel terkait kedokteran. “Saya juga berusaha untuk mencari *update* ilmu di luar, *kalo gak* gitu ya kemampuan saya akan terus menurun. Kadang-kadang saya ikut seminar di luar”, ungkapnya. Kepada para dokter

Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Sekretariat BPPK

Sebagai bagian dari komitmen BPPK untuk melayani para peserta diklat, BPPK menyediakan fasilitas kesehatan di tempat penyelenggaraan diklat. Salah satunya adalah Poliklinik di Sekretariat BPPK. Ada dua klinik, yaitu klinik umum dan klinik gigi.

Klinik umum melayani keluhan penyakit ringan dan penanganan awal. Disiapkan fasilitas tabung oksigen bagi penderita sesak nafas atau gangguan jantung. Bagi para penderita alergi, bisa juga mendapatkan suntikan anti alergi serta tablet untuk mengatasi gangguan koroner bagi penderita gangguan jantung. Semua tindakan ini dilakukan sebagai penanganan awal sebelum menuju perawatan yang lebih intensif di rumah sakit. Untuk menyempurnakan pelayanan, kedepannya diharapkan poliklinik BPPK juga didukung dengan fasilitas mobil *ambulance*.

Pegawai BPPK dan peserta diklat dapat memanfaatkan poliklinik ini. Selama ini, poliklinik sekretariat sudah memiliki cukup banyak pasien dari peserta diklat. Keluhan yang datang cukup variatif, mulai dari yang sifatnya ringan, seperti influenza, sampai penyakit hipertensi serta penyakit metabolik.



Foto: Eros L. Mursalin

muda yang ingin berpraktek di instansi pemerintahan yang bukan rumah sakit atau puskesmas, dr. Edu berpesan untuk mencari pengalaman terlebih dahulu di tempat lain, seperti di puskesmas. “Puskesmas itu tidak hanya menghadapi penyakit secara orang-per orang, tapi masyarakat di situ, budayanya. Bagaimana pendekatannya dengan pimpinan atau ketua adat setempat”, ujarnya. Untuk menghadapi semua itu butuh pengalaman yang cukup serta proses.

Seiring dengan perjalanan hidupnya, dr. Edu selalu menghargai proses. Ia berpendapat bahwa semua hal itu tidak ada yang instan, membutuhkan proses dan waktu. “Contohnya, jika kita ingin ke ke Blok M, ada prosesnya: bisa 5

menit atau 10 menit. Butuh waktu untuk menuju ke sana”, pungkasnya.

Bersama Keluarga

Dr. Edu berasal dari keluarga guru. Kedua orangtuanya adalah seorang guru sewaktu di Medan. “Dulu ibu saya mengajar di Perguruan Nasrani”, ungkapnya. Pria kelahiran Medan, 19 Januari 1961 ini memiliki satu orang putri. Bersama sang istri, putri mereka adalah anak kesayangan. Biasanya, akhir pekan adalah waktu yang digunakan oleh dr.Edu untuk bersantai dengan keluarga. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengisi waktu bersama keluarga, seperti jalan-jalan, makan di luar, atau kegiatan lain yang memberikan nilai pembelajaran untuk putri semata wayangnya. “Ya karena anak emas tadi, pokoknya kalau

anak bilang ingin ke suatu tempat, kami ikuti”, tambahnya.

Selain kegiatan di kantor, pria penyuka tempe goreng ini juga aktif dalam pelayanan di gereja. Di HKBP Pulomas, dr. Edu tercatat sebagai salah seorang majelis. Sebagai bagian dari pelayanan, setiap hari minggu setelah ibadah pagi, dr. Edu juga menyelenggarakan pengobatan gratis bagi para jemaat yang hadir. “Saya mau melayani. Saya ingin memberikan apa yang saya punya. Saya punya waktu, ada ilmunya, ya saya berikan”, ujarnya.

Quiz



Win



**Powerbank dan
Suvenir Menarik!!**

Tebak Nama Tempat/Lokasi Gedung /Bangunan yang ada di atas. Tuliskan Jawaban serta Nama Lengkap dan Nama/ Alamat Kantor berikut Nomor HP Anda. Kirim ke alamat Redaksi Media Edukasi dan Informasi Keuangan, melalui email ke edukasikeuangan@depkeu.go.id.

Jawaban paling lambat kami terima **31 Mei 2014**

Penentuan pemenang dengan cara di undi JIKA yang berhasil menjawab Tepat dan Benar lebih dari satu orang

Pengumuman Pemenang akan di umumkan pada Media Edukasi Edisi ke-22 (Bulan Juni 2014)

Selamat!!!

Kepada Pemenang Kuis Edukasi Keuangan Edisi 20,

Nama : Azwar

NIP : 198503042004131002

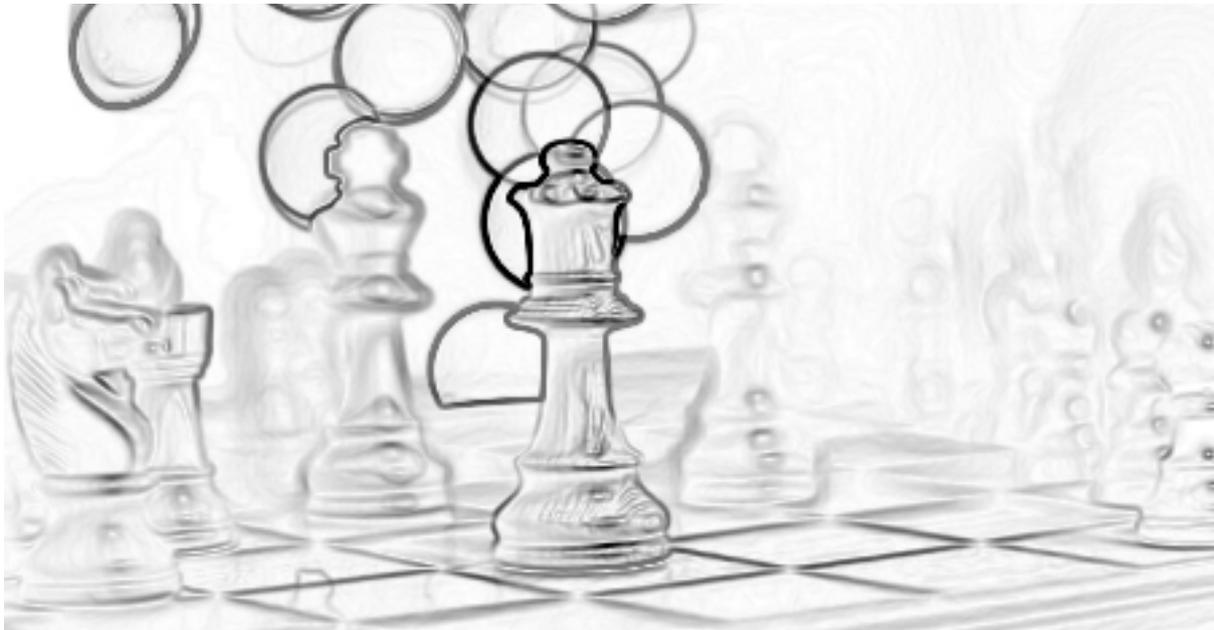
Unit Kerja :
BDK Makassar

Alamat :
Kompleks Perkantoran
Gedung Keuangan Negara,
BDK Makassar,
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4
Makassar 90234

(Kuis Edukasi Keuangan) tidak berlaku untuk semua Pengurus dan anggota serta keluarga Dewan Redaksi Media Edukasi Keuangan

Serambi Ilmu

- ▶ Kecerdasan Percakapan dalam Komunikasi Transformasional
- ▶ Menelisik Makna Kata Laporan dan Pengaduan dalam Pasal 43A UU KUP
- ▶ Manajemen Ekonomi pada Ilmu Keuangan Negara
- ▶ *Cloudnomics*: Menguak Peluang Ekonomi dari Komputasi Awan
- ▶ Komunikasi Data Digital Menggunakan Jaringan Listrik
- ▶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Babak Baru Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan



Kecerdasan Percakapan dalam Komunikasi Transformasional

Oleh: Iqbal Islami -
Widyaiswara Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang pemimpin. Efektif tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya akan dipengaruhi diantaranya oleh kemampuan untuk melakukan komunikasi, yang salah satunya berupa komunikasi interpersonal.

Bentuk komunikasi interpersonal secara lisan yang sering dilakukan adalah *conversation* atau percakapan. Untuk dapat melakukan percakapan dengan baik sehingga komunikasi yang

dilakukan dapat berjalan efektif, maka seseorang membutuhkan *conversational intelligence* (CI) atau kecerdasan dalam percakapan. Semakin tinggi tingkat CI seseorang, maka ia akan semakin mampu untuk membangun *trust* atau kepercayaan dari mitra bicarannya. Dalam hubungan pemimpin dan bawahan, unsur kepercayaan merupakan hal yang penting untuk memastikan hubungan yang erat dan tinggi antara mereka.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat CI seorang pemimpin, akan semakin efektif pula untuk menjalankan fungsi

kepemimpinannya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya menjalin komunikasi secara terbuka dengan bawahannya, meningkatkan rasa saling percaya, sehingga dapat menjadikannya sebagai pemimpin yang transformasional.

Tulisan ini lebih dimaksudkan untuk membahas efektivitas seorang pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahan atau para pengikutnya dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasinya.

B. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah proses yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan ide, pikiran, dan perasaan kita kepada orang lain. Tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk mencapai suatu pemahaman yang sama, membangun suatu hubungan yang lebih baik, dan/atau persetujuan tentang apa yang akan dilakukan kemudian jika dibutuhkan.

Pengertian kompetensi *interpersonal communication* menurut Kamus Kompetensi Kemenkeu adalah sebagai berikut:

1. Berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi.
2. Orang-orang yang kompeten, mendengarkan secara efektif dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Mampu mengartikulasikan pandangan dan gagasan mereka secara jelas. Menyampaikan informasi secara langsung dan logis dan memastikan pemahaman. Mereka berbagi informasi dengan orang lain yang akan meningkatkan kemajuan kerja secara keseluruhan.

Komunikasi interpersonal bersifat timbal balik. Artinya, dalam melakukan komunikasi interpersonal, seseorang selain dituntut untuk mampu mengartikulasikan gagasan, ide, dan pikirannya, maka orang tersebut harus juga memiliki kemampuan

untuk mendengarkan secara efektif. Tanpa kemampuan mendengar yang efektif maka komunikasi interpersonal yang efektif tidak akan terjadi.

Untuk menjadi pendengar yang efektif, maka pada waktu melakukan komunikasi interpersonal seseorang harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Seseorang harus memberi perhatian penuh atas apa yang dikatakan dan cara mitra bicara menyampaikannya. Seseorang tidak hanya dituntut untuk mampu memahami isi pesan yang bersifat verbal namun juga harus dapat melihat, merasakan, dan menangkap pesan-pesan yang bersifat nonverbal.

C. Komunikasi dan Kepemimpinan Transformasional

Menurut James MacGregor Burns, seorang pemimpin transformasional mampu menginspirasi pengikutnya untuk mengubah ekspektasi, persepsi, dan memotivasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan intrinsik yang lebih tinggi tingkatannya daripada tujuan-tujuan ekstrinsik yang lebih rendah tingkatannya. Pemimpin transformasional mampu memotivasi bawahannya untuk berkinerja lebih dari yang diharapkan, dengan menginspirasi bawahannya untuk fokus pada misi-misi luar biasa yang lebih luas, jauh melebihi kepentingan pribadinya. Pada kutub yang berbeda, pemimpin transaksional, menurut Burns, memandang hubungan dengan bawahannya sebagai suatu transaksi pertukaran, satu hal dengan hal lain, seperti penghargaan dari pimpinan kepada bawahan dikaitkan dengan loyalitas dan kinerja bawahannya. Hubungan pimpinan dan bawahannya tidak sekedar dalam hubungan kerja saja. Salah satu ciri dari pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menggunakan cara-cara komunikasi yang efektif dalam berkomunikasi dengan para bawahannya untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan intrinsik yang lebih tinggi seperti moralitas dan etikal.

Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi interpersonal. Dalam lingkungan kerja, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan dengan melakukan komunikasi interpersonal. Seorang pemimpin harus melakukan komunikasi interpersonal dengan para bawahannya. Dengan kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi, seorang pemimpin akan mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang tinggi kepada para bawahannya sehingga mereka akan mau bekerja sepenuh hati. **Kemampuan komunikasi interpersonal yang dimiliki oleh seorang pimpinan akan menentukan keberhasilannya dalam mempengaruhi dan menginspirasi para bawahannya.**

Selain itu, dengan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, seorang pemimpin akan dapat menjelaskan ide dan pikirannya kepada para bawahannya sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang sama. Dengan demikian dapat dihindari adanya pemahaman.

Hubungan antara pemimpin dan para pengikut atau bawahannya dibangun dengan komunikasi interpersonal yang baik. Cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan pola hubungan yang terbangun. Secara umum para bawahan akan menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai dengan yang dilakukan atasannya. Seorang pemimpin yang cenderung melakukan komunikasi interpersonal yang bersifat formal akan menghasilkan hubungan yang juga bersifat formal. Sebaliknya, seorang pemimpin yang biasa melakukan komunikasi dengan cara yang informal, biasanya akan dapat membangun hubungan yang lebih erat dan informal dengan para bawahannya.

Agar komunikasi interpersonal dapat dilakukan secara efektif maka seorang pimpinan harus melakukannya dengan cara yang tepat. **Efektivitas komunikasi interpersonal tidak hanya tergantung pada isi atau apa yang dikatakan tapi juga pada tekanan (*tone*) yang**

digunakan dan bagaimana cara (*manner*) mengatakannya.

Komunikasi seorang pemimpin kepada bawahannya tidak sekedar menyampaikan fakta atau perintah. Bagaimana cara fakta atau perintah tersebut disampaikan juga akan menentukan hasil komunikasi yang dilakukan. Sebagai contoh, perintah yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya dapat menimbulkan resistensi dari para bawahan apabila disampaikan dengan cara yang tidak tepat.

D. Kecerdasan Percakapan (*Conversational Intelligence*)

Salah satu bentuk komunikasi interpersonal adalah *conversation* atau percakapan. Kemampuan untuk melakukan percakapan merupakan kemampuan yang penting dalam melakukan komunikasi interpersonal. Bagi seorang pemimpin, kemampuannya dalam melakukan percakapan akan mempengaruhi efektivitasnya untuk menjadi pemimpin transformasional.

Menurut Judith E. Glaser, *Conversational Intelligence (CI)* dapat dikembangkan pada tingkatan organisasi, tim, dan individu. Pada tingkatan organisasi, CI adalah kemampuan suatu organisasi untuk berkomunikasi dengan cara-cara yang dapat menciptakan suatu konsep realitas bersama. Pada tingkatan individu, CI adalah kemampuan yang ada pada semua manusia untuk berhubungan, bekerjasama, dan bernavigasi dengan orang lain. CI merupakan usaha bersama yang bersifat kolaborasi. Semakin sering digunakan bersama-sama maka CI akan semakin meningkat.

Menurut Glaser, terdapat tiga tingkatan (level) CI, yaitu:

1. Level I: Transaksional.
Percakapan pada tingkatan ini lebih banyak bersifat "memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan". Percakapan seperti ini akan menimbulkan rasa takut dan resistensi. Percakapan yang dilakukan tidak banyak didasarkan oleh rasa saling percaya. Orang

yang melakukan ini merasa sedang melakukan komunikasi padahal tidak. Ia akan memicu pikiran dan perasaan dari mitra bicaranya bahwa ia punya agenda tertentu yang bukan merupakan kepentingan terbaik mitra bicaranya.

2. Level II: Posisional.
Percakapan pada tingkatan ini lebih bersifat “menjual dan mempertahankan pendapat kita”. Percakapan dilakukan dengan tingkat mendengar yang rendah dan cenderung akan menimbulkan ketidakpercayaan dari mitra bicaranya. Kita bertanya pendapat orang lain semata-mata dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat orang lain agar sama atau sejalan dengan pendapat kita. Hal ini akan memberikan sinyal pada pikiran dan perasaan mitra bicara kita untuk “tidak percaya pada motif kita”.
3. Level III: Transformasional.
Percakapan pada tingkatan ini lebih bersifat “berbagi dan menemukan”. Percakapan dilakukan berdasarkan rasa saling percaya. Kita benar-benar tertarik pada pikiran dan ide orang lain, dan kita terbuka untuk berbagi bersama-sama mencapai tujuan. Percakapan pada tingkatan ini dilakukan dengan tingkat mendengar yang tinggi. Kita berkomunikasi dengan perhatian dan keterusterangan yang akan memberikan sinyal kepercayaan pada pikiran dan perasaan mitra bicara kita. Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dari percakapan.

Menurut Glaser, untuk meningkatkan CI kita ke tingkatan tertinggi yaitu *Transformational Intelligence (TI)*, maka kita perlu menjadi master dan pencipta ritual percakapan yang memungkinkan sebesar mungkin kita mengekspresikan ide, perasaan, firasat, pikiran, dan aspirasi.

Pada tingkatan transaksional, percakapan seringkali hanya dilihat secara sempit yaitu sebagai sarana untuk memberitahu, mempengaruhi, atau membuat orang

lain berpikir seperti yang kita pikirkan. Akibatnya, apabila ada selisih pendapat maka selisih tadi tidak akan semakin kecil atau hilang karena percakapan yang dilakukan tidak menggunakan CI yang transformasional. Dengan CI yang transformasional maka selisih tadi akan semakin mengecil atau bahkan hilang sama sekali. Dengan demikian, menurut Glaser, CI pada tingkatan transformasional dapat menghasilkan perbaikan hasil bisnis dan menciptakan kerangka untuk peningkatan hubungan dan kerjasama, mengeluarkan energi baru untuk pertumbuhan dan transformasi.

Beberapa contoh kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin dalam percakapan yang menunjukkan bahwa pemimpin tersebut mempunyai tingkatan CI yang rendah.

1. Mengabaikan perspektif orang lain.
Pemimpin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjelaskan pandangan dan sikapnya, bukan untuk mempelajari bagaimana perspektif para bawahannya dan penilaian mereka atas situasi yang terjadi. Akibatnya, pemimpin tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mempunyai hubungan yang erat dengan para bawahannya.
2. Fiksasi “sebagai yang benar”. Pemimpin yang mempunyai gairah atau bahkan memaksakan bahwa “ialah yang benar” dan memandang dirinyalah yang punya jawaban yang “benar”. Menghadapi pemimpin seperti itu, para bawahannya akan semakin memproteksi posisi dan pandangannya karena tidak ada kepercayaan kepada pemimpinnya. Situasi seperti ini akan menurunkan hubungan antara pemimpin dan bawahannya, bahkan dapat menimbulkan konflik.
3. Mementingkan pandangan yang sama dengan dirinya. Pemimpin yang lebih banyak berkata-kata untuk mempengaruhi bawahannya agar mempunyai pandangan yang sama atau sejajar dengan pandangannya tidak selalu akan menghasilkan komunikasi, pemahaman, dan pengaruh yang lebih baik pada bawahannya. Bahkan,

- semakin banyak seorang pemimpin menciptakan *groupthink*, maka hal itu dapat menimbulkan resistensi ataupun munculnya ketaatan hanya sekedar adanya rasa takut dari bawahannya.
4. Tidak memperhatikan sikap bawahannya. Pemimpin yang tidak memperhatikan atau acuh saja apakah bawahannya benar-benar memperhatikan pembicaraannya atau sekedar pura-pura saja, akan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang erat dengan bawahannya karena bawahannya akan acuh juga terhadap pemimpinnya.

Menurut Glaser, CI yang transformasional dimulai dengan adanya *trust* atau kepercayaan antara pemimpin dan para bawahannya. Dalam hubungan antara seorang pemimpin dan para bawahannya, penting sekali hubungan tersebut didasarkan pada adanya saling kepercayaan di antara mereka. Untuk mendapatkan kepercayaan dari bawahannya maka seorang pemimpin harus mempunyai kredibilitas di mata para bawahannya. Salah satu sumber kredibilitas dari seorang pemimpin adalah dia melakukan apa yang dia katakan (*walk the talk*). Apabila hal-hal baik yang diucapkannya ternyata tidak dilakukannya dalam perilakunya sehari-hari, maka pemimpin tersebut akan kehilangan kredibilitasnya di mata para bawahannya.

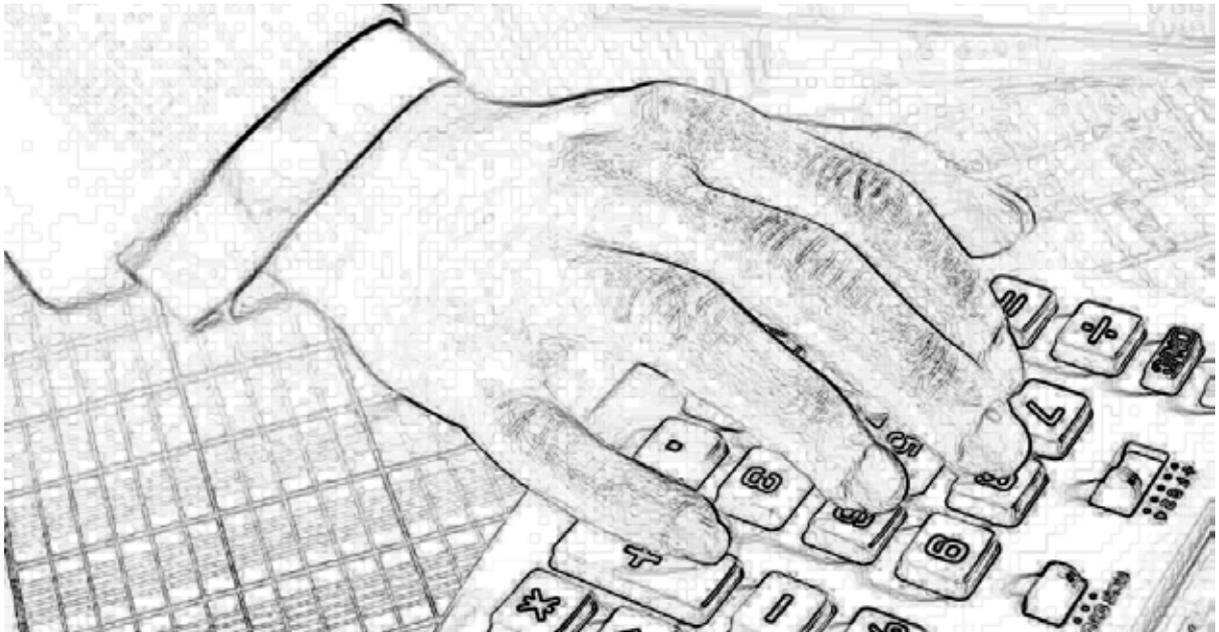
Dalam komunikasi, menurut Glaser, ketidakpercayaan akan menimbulkan *defensive listening* dan kepercayaan akan menimbulkan *intelligent listening*. Para bawahan yang tidak mempunyai kepercayaan pada pemimpinnya akan menutup telinga dan pikirannya terhadap apa yang disampaikan pemimpinnya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi seorang pemimpin untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat yang didasarkan oleh saling kepercayaan. Apabila para bawahannya percaya bahwa pemimpinnya mempunyai keinginan untuk mendekati perbedaan, bersifat terbuka dan transparan, fokus pada respek dan hubungan dibandingkan pekerjaan,

mendengar untuk memahami, menemukan kesuksesan bersama dan secara konsisten bekerja untuk mempersempit celah realitas, maka organisasi tersebut akan lebih dapat mencapai tujuan organisasinya dan bahkan mungkin tujuan para personilnya juga.

E. Kesimpulan

Untuk menjadi pemimpin transformasional seorang pemimpin dalam melakukan percakapan harus mempunyai CI pada tingkatan transformasional yang dimulai dengan adanya *trust* atau kepercayaan antara pemimpin dan para bawahannya. Hubungan antara seorang pemimpin dan para bawahannya harus dibangun berdasarkan adanya saling kepercayaan di antara mereka. Untuk mendapatkan kepercayaan dari bawahannya maka seorang pemimpin harus mempunyai kredibilitas di mata para bawahannya. Salah satu sumber kredibilitas dari seorang pemimpin adalah dia melakukan apa yang dia katakan (*walk the talk*).

Pemimpin yang mempunyai CI yang transformasional akan mempunyai keinginan untuk mendekati perbedaan, bersifat terbuka dan transparan, fokus pada respek dan hubungan dibandingkan pekerjaan, mendengar untuk memahami, menemukan kesuksesan bersama dan secara konsisten bekerja untuk mempersempit celah realitas. Pemimpin demikian dapat menjadi pemimpin transformasional yang mampu untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan para bawahannya untuk bekerja sepenuh hati untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi tersebut dapat mencapai tujuan organisasinya dengan lebih baik dan bahkan mungkin tujuan para personilnya juga.



Menelisik Makna Kata LAPORAN dan PENGADUAN dalam Pasal 43A UU KUP

Oleh: Agus Suharsono -
Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Hukum Pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara (Undang-Undang KUP). Pada undang-undang ini, selain aspek Hukum Administrasi Negara juga terdapat aspek Hukum Pidana. Salah satu aspek Hukum Pidananya adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 43A UU KUP yaitu tentang Informasi, data, laporan, dan pengaduan

(IDLP). Masih banyak yang belum bisa membedakan makna kata *laporan* dan *pengaduan*, atau paling tidak, menyamakan makna kata *laporan* dan *pengaduan* tersebut, sehingga penggunaannya sering rancu dan terbolak-balik.

Laporan dan *pengaduan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A UU KUP adalah bahasa hukum. Menurut Satjipto Rahardjo bahasa hukum mempunyai dua fungsi. *Pertama*, sebagai sarana komunikasi,

bahasa perundang-undangan harus dapat menghantarkan pikiran dan kehendak pembuat undang-undang kepada rakyat sehingga hukum sebaiknya dirumuskan dalam bahasa yang mudah dimengerti. *Kedua*, sebagai bahasa dengan ragam teknik, bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi diantara para ahli hukum, istilah dirumuskan dengan baik dan tepat agar memenuhi kebutuhan dan tuntutan kerja mereka agar terhindar dari kesalahpahaman.

Kerancuan yang sering terjadi adalah penggunaan kata pengaduan dalam kalimat *'Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan pengaduan masyarakat.'* Sekilas kalimat tersebut benar tetapi jika ditelisik secara yuridis tidak begitu adanya. Penggunaan kata "pengaduan" tidak tepat. Seharusnya menggunakan kata "laporan", karena "pengaduan" untuk pemberitahuan delik aduan bukan delik biasa.

Tulisan ini adalah tulisan dalam ranah Ilmu hukum. Berbeda dengan ilmu sosial lainnya, ilmu hukum mempunyai kekhasan karakter yang direfleksikan dalam sifatnya yang normatif, yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif atau hukum yang berlaku. Tulisan ini akan membahas makna kata laporan dan pengaduan dalam Pasal 43A UU KUP.

Sejarah IDLP dalam Undang-Undang KUP

UU KUP pertama kali diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1983. Pada awalnya UU KUP belum mengatur tentang IDLP. Sampai saat ini UU KUP telah mengalami empat kali perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007 menambahkan ketentuan Pasal 43A yang mengatur tentang IDLP. Kata laporan dan pengaduan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah

sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lazimnya untuk mencari makna kata dalam sebuah undang-undang adalah dengan mencarinya dalam ketentuan pasal 1. Namun UU KUP dalam Pasal 1 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan. Untuk itu kita bisa menelisik dari undang-undang lain.

Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh DJP akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa IDLP dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 1 angka 27 UU KUP) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pengertian bukti permulaan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP yaitu keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa IDLP berada dalam ranah Hukum Acara Pidana Perpajakan. Karena UU KUP tidak mendefinisikan kata laporan dan pengaduan maka dapat kita telisik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Makna Kata Laporan dan Pengaduan
Berdasarkan KUHAP sebagai bahan hukum primer laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut.

- Pasal 1 angka 24, **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- Pasal 1 angka 25, **Pengaduan** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan **tindak pidana aduan** yang merugikannya.

Dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa laporan berhubungan dengan peristiwa pidana atau delik biasa, sedangkan pengaduan berhubungan dengan tindak pidana atau delik aduan.

Untuk melengkapi makna kata laporan dan pengaduan, akan ditelisik berdasarkan bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan; berita. Sedangkan proses, cara, perbuatan melaporkan adalah pelaporan. Pengaduan adalah 1. Penyambungan; 2. Proses, cara, perbuatan mengadu; 3. Ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan. Makna yang diberikan oleh KBBI untuk proses pemberitahuan adalah pelaporan dan pengaduan. Laporan adalah nomina atau kata benda, sehingga jika digunakan untuk proses pemberitahuan yang tepat adalah pelaporan. Namun sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo bahwa bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum, istilah diusahakan untuk dirumuskan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya agar memenuhi kebutuhan dan tuntutan kerja mereka agar terhindar dari kesalahpahaman dan KUHAP telah menggunakan kata laporan, bukan pelaporan, maka sebaiknya tetap menggunakan kata laporan.

Delik Biasa dan Delik Aduan

Sebelum membahas lebih lanjut perlu juga dibahas apa yang dimaksud dengan

delik biasa dan delik aduan. Delik menurut Teguh Prasetyo adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana. Rumusan delik (*strafbaar feit*) yang lengkap adalah apa yang dirumuskan oleh Simons, delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam literatur, delik tersebut dibagi dalam beberapa macam, misalnya delik kejahatan, delik pelanggaran, delik materiel, delik formiel, delik omisi, delik komisi, delik politik, delik umum, dan masih banyak lagi. Delik juga bisa dibagi berdasarkan pemrosesan perkara, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban. Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Delik aduan menurut E. Utrecht diadakan tidaknya tuntutan terhadap delik itu digantungkan pada ada tidak adanya persetujuan dari yang dirugikan. Alasan satu-satunya delik aduan adalah dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut. Contoh delik aduan adalah perzinahan, penghinaan, atau pengelapan barang titipan.

Menurut P.A.F. Lamintang perbedaan antara laporan dengan pengaduan sebenarnya erat hubungannya dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang dilaporkan atau diadukan. Pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang disebut laporan, apabila pemberitahuan tersebut berkenaan dengan dilakukannya tindak pidana biasa (*gewone delict*). Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan berkenaan dengan dilakukannya tindak pidana aduan (*klachtdelict*).

Dari penjelasan tersebut sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa dalam Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan makna kata laporan dan pengaduan. Laporan untuk memberitahukan adanya tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan untuk memberitahukan tindak pidana aduan. Dari kesimpulan ini timbul pertanyaan, apakah hal tersebut juga berlaku bagi ketentuan pidana perpajakan yang diatur dalam UU KUP?

Laporan dan Pengaduan dalam Undang-Undang KUP

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat didekati melalui interpretasi hukum. McLeod mengemukakan tiga prinsip *contextualism* yaitu: (1) *asas noscitur a sociis* yang artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkainya, (2) *asas ejusdem generis* yang artinya satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya, konsep Hukum Administrasi Negara belum tentu sama maknanya dengan Hukum Perdata atau Hukum Pidana, (3) *asas expressio unius exclusio alterius* artinya kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Berdasarkan prinsip *contextualism* maka, karena UU KUP tidak mendefinisikan dan karena laporan dan pengaduan merupakan istilah dalam ranah Hukum Acara Pidana, maka penulis berpendapat bahwa makna kata laporan dan pengaduan dalam Pasal 43A UU KUP adalah sama dengan yang dimaksud dalam KUHP, yaitu laporan untuk pemberitahuan adanya tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan untuk pemberitahuan adanya tindak pidana aduan.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi perbuatan pidana apa saja dalam UU KUP yang termasuk dalam delik biasa dan mana yang merupakan delik aduan. Pada prinsipnya semua delik adalah delik biasa karena Hukum Pidana merupakan hukum publik, sudah menjadi tugas negara melalui aparatnya untuk menjamin dan melindungi keamanan warga negaranya. Untuk memudahkan, kita

identifikasi delik aduan maka selebihnya adalah delik biasa. Yang merupakan delik aduan dalam pidana perpajakan diatur dalam Pasal 41 UU KUP yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat baik karena kealpaan maupun sengaja memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya atau sering dikenal dengan istilah membuka rahasia jabatan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna kata pelaporan dalam IDLP yang diatur dalam Pasal 43A UU KUP adalah pemberitahuan adanya semua tindak pidana perpajakan, kecuali yang diatur dalam Pasal 41 UU KUP karena merupakan delik aduan. Sehingga kalimat '*Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan pengaduan masyarakat.*' Tidaklah tepat, seharusnya '*Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan laporan masyarakat.*' Penggunaan kata yang tepat untuk pengaduan adalah dalam kalimat '*Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pejabat) dilakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan pengaduan masyarakat karena memberitahukan rahasia jabatan kepada pihak lain yang tidak berhak.*'

Laporan dan Pengaduan Dalam *Ius Constitutum*

Pasal 43A ayat (4) UU KUP mendelegasikan pengaturan tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sudah ada dua PMK yang menjalankan amanat tersebut, yaitu PMK Nomor 202/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan PMK Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Hanya saja keduanya berbeda dalam mendefinisikan laporan dan pengaduan. Agar dapat diketahui perbedaannya dapat disandingkan dalam sebuah tabel.

Setelah disandingkan dapat diketahui

bahwa tidak terdapat perbedaan dalam mendefinisikan laporan, tetapi definisi pengaduan terdapat perbedaan yang signifikan. PMK No. 202/PMK.03/2007 mendefinisikan pengaduan lebih tepat karena sesuai dengan KUHAP dan pendapat para sarjana ahli hukum. PMK No. 18/PMK.03/2013 mendefinisikan pengaduan secara lebih luas sehingga kita tidak bisa membedakan dengan laporan dan dapat ditafsirkan seolah-olah tidak ada hubungan antara pengaduan dengan delik aduan.

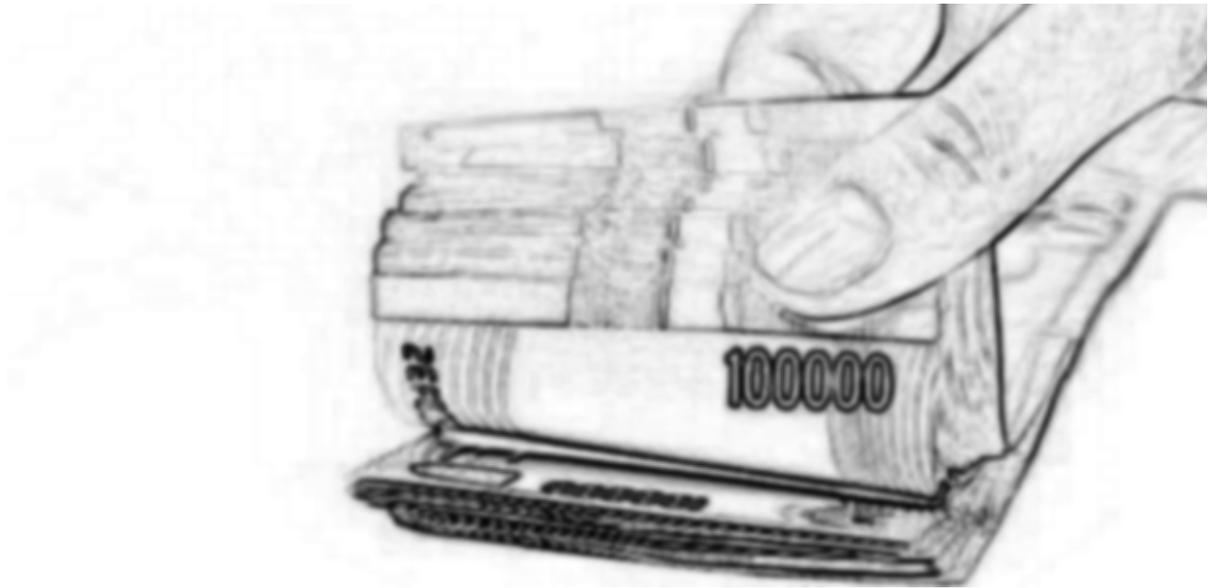
Setelah membahas makna kata laporan berdasarkan peraturan, pendapat para ahli hukum dan kamus dapat disimpulkan bahwa makna kata laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A UU KUP adalah berbeda. Laporan digunakan untuk pemberitahuan delik biasa, sedangkan pengaduan untuk pemberitahuan delik aduan. Untuk itu direkomendasikan sebagai berikut.

1. Memasukkan definisi laporan dan pengaduan dalam Pasal 1 UU KUP (ius constituendum) sebagaimana dalam Pasal 1 KUHAP tetapi khusus untuk pidana perpajakan.
2. Definisi laporan dalam Pasal 2 ayat (4)

dan pengaduan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK No. 18/PMK.03/2013 sebaiknya diatur dalam pasal 1, karena lazimnya sebuah peraturan, definisi diatur dalam pasal 1.

3. Definisi pengaduan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK No. 18/PMK.03/2013 sebaiknya menggunakan difinisi yang lebih tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 PMK No. 202/PMK.03/2007.

PMK No.202/PMK.03/2007	PMK No.18/PMK.03/2013
Pasal 1 angka 4. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.	Pasal 2 ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
Pasal 1 angka 5. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan di bidang perpajakan.	Pasal 2 ayat (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang.



Manajemen Ekonomi pada Ilmu Keuangan Negara

Oleh: Syaiful Anwar -
Widyaiswara Pusklat Bea dan Cukai

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya baik secara individual maupun secara kolektif. Secara umum yang dikatakan masalah ekonomi adalah masalah tentang keterbatasan sumberdaya (*limited resources and scarcity*) dihadapkan dengan keinginan manusia yang tak terbatas (*unlimited want*).

Mengingat obyek kajian Ilmu Ekonomi adalah perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya, yang secara spesifik dirumuskan dengan adanya

kelangkaan sumber daya, maka timbul masalah “pilihan” dan setiap pilihan yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan “pengorbanan dalam bentuk kehilangan peluang”. Dengan demikian, secara sederhana ilmu ekonomi dapat diformulasikan :

Scarcity/Kelangkaan -> Pilihan-pilihan -> Pengorbanan (*Opportunity Cost*)

Ruang lingkup kajian ilmu ekonomi termasuk juga dalam lingkup administrasi negara. Tulisan ini akan memberikan pandangan yang lebih kongkrit mengenai hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu keuangan negara dan ilmu hukum

administrasi keuangan negara.

Dalam Ilmu Keuangan Negara, pilihan-pilihan yang dimaksudkan dalam formula ilmu ekonomi berupa pilihan politik atau keputusan politik yang dilakukan elit Politik. Keputusan ini dijalankan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) baik yang berdimensi jangka panjang, menengah atau jangka pendek. Keputusan akan mempunyai dampak ekonomis (dalam bentuk pengorbanan kehilangan peluang yang lain) yang sangat luas dalam masyarakat atau dampak kemakmuran bagi masyarakat. Demikian juga pilihan-pilihan dalam “Keputusan Pejabat Publik (*Beschikking*)” akan berdampak pada pembebanan ekonomis kepada masyarakat (pajak, retribusi, pendapatan negara bukan pajak) dan pembebanan anggaran negara (pengeluaran negara).

Ilmu Hukum Administrasi Keuangan Negara memberi justifikasi (*legal mandate*) atas setiap keputusan publik yang berdampak terhadap pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul akibat suatu “pilihan keputusan publik” yang berdampak secara ekonomis membebani masyarakat atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu memahami perilaku ekonomi manusia dan masyarakat adalah penting guna membimbing dan mengarahkan potensi ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan umum. Hal itu akan mungkin terjadi apabila Penyelenggara negara dan pemerintahan memahami berbagai Variabel/Besaran ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan dan atau penurunan kesejahteraan umum.

Variabel/besaran ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan umum :

- Ekonomi sedang bertumbuh (*recovery and boom*)
- Investasi Meningkat (*Domestic Investment & Foreign Investment*)
- Pengangguran menurun (Lapangan Kerja bertambah)
- Inflasi dapat dikendalikan (Inflasi Lunak / *Soft Inflation*)
- Ekspor lebih besar dari Impor (Neraca

Perdagangan dan Neraca Pembayaran Internasional Surplus)

- Pendapatan masyarakat meningkat
- Tingkat pendidikan
- Tingkat kesehatan
- Pembangunan perumahan
- Penyebaran pembangunan

Variabel/besaran ekonomi menurunkan kesejahteraan umum

- Ekonomi sedang menurun (*recession and depression*)
- Investasi turun
- Pengangguran meningkat (lapangan kerja menyusut)
- Inflasi meningkat \Rightarrow harga-harga naik
- Ekspor lebih kecil dibandingkan Impor (mengalami *disequilibrium* Neraca Perdagangan/Pembayaran Internasional dan *deficit*)
- Pendapatan masyarakat cenderung menurun
- Kualitas pendidikan masyarakat rendah
- Kualitas kesehatan/gizi masyarakat rendah
- Banyak orang miskin yang tidak mempunyai rumah (*homeless*)
- Pemerataan pembangunan tidak terjadi

Variabel/Besaran Sektor Real yang berdampak pada kesejahteraan umum

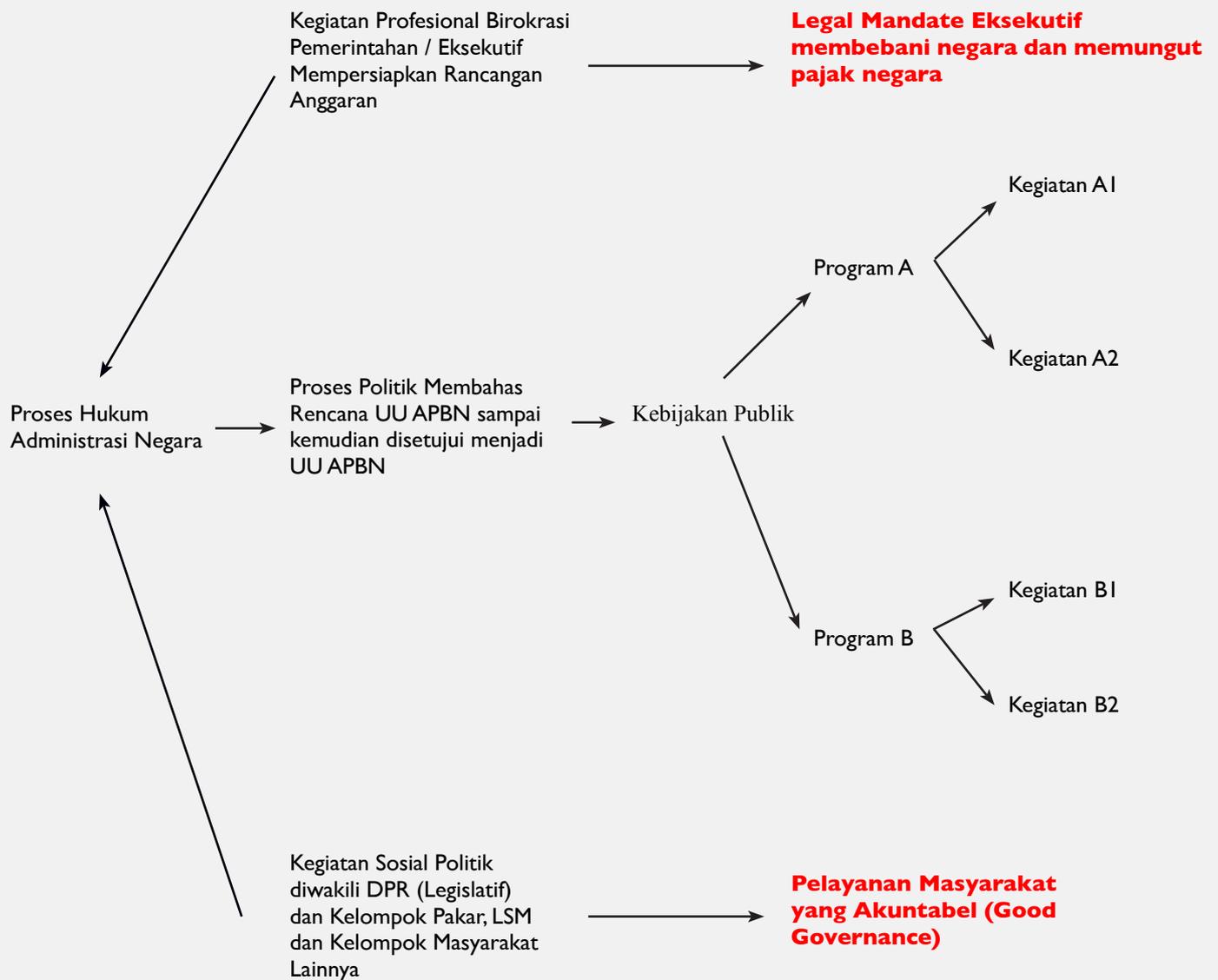
- Sistem Distribusi Bahan Pokok/Pangan
- Sistem Distribusi Bahan Bakar/Energi
- Sistem Distribusi Pupuk
- Sarana Pelabuhan
- Sistem dan sarana Transportasi

Ilmu Ekonomi memberi alat/teknologi untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dengan keputusan Politik Penyelenggara Negara dan Pemerintahan terhadap kesejahteraan umum. Dengan melakukan pilihan keputusan melalui kebijakan publik diharapkan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kemakmuran bagi masyarakat.

Ilmu Keuangan Negara

Ilmu keuangan negara adalah pengetahuan hasil integrasi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara dengan Ilmu Ekonomi yang melahirkan suatu Ilmu (Paradigma) tentang penyelenggaraan pemerintahan (*applied science*) dari perspektif “Keuangan Negara”. Yaitu

bagaimana penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan membuat keputusan publik baik politis maupun profesional birokrasi yang berdampak pada pembebanan keuangan masyarakat. Hal ini akan mengurangi daya beli masyarakat namun di sisi lain menggunakan keuangan publik ditujukan untuk sebesar-besar



kemakmuran rakyat. Perencanaan, Pembahasan, Pelaksanaan, Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah *resultante* dari berbagai kepentingan dan cita-cita bangsa dalam upaya mewujudkan kemakmuran.

Mengapa ilmu keuangan negara penting? Ilmu keuangan negara penting karena ilmu keuangan negara membahas bagaimana “penyelenggara pemerintah” memperoleh *legal mandate* dan bagaimana *legal mandate* yang dimiliki “penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaannya/ implementasinya” dirasakan adil, *fair*, akuntabel dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umum masyarakat.

Oleh sebab itu APBN adalah hasil proses politik dan menjadi dokumen politik dan suatu kontrak politik tahunan tentang apa yang akan dilakukan oleh eksekutif (sebagai pemegang *legal mandate* eksekutif) dan rakyat (diwakili oleh DPR/ legislatif) dalam suatu masa pemerintahan lima tahunan.

Integrasi Hukum Administrasi Negara dan Manajemen Ekonomi

Dengan demikian ada perbedaan *paradigmatic* tentang Ilmu Keuangan Negara dibandingkan dengan Ilmu Ekonomi Publik. Ekonomi Publik membahas tentang seluruh aspek *Kebijakan Pemerintah* dibidang ekonomi dan berbagai kebijakan sektor publik untuk memperoleh peluang (*opportunity*) guna meningkatkan keuntungan *private sector / swasta*.

Ilmu Keuangan Negara adalah ilmu yang membahas bagaimana penyelenggara negara/pemerintahan memperoleh *legal mandate* lembaga publik/negara (DPR) guna melaksanakan berbagai Kebijakan Pemerintah/Publik untuk keuntungan masyarakat luas dan kesejahteraan umum (*social benefit/profit*).

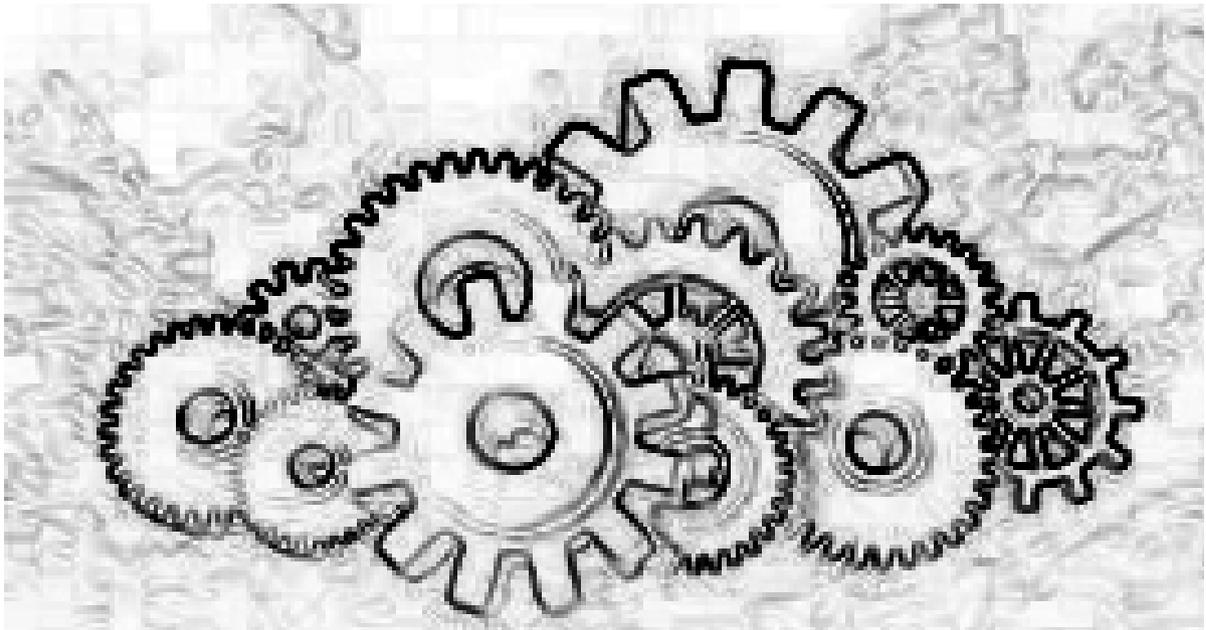
Dengan demikian Ilmu Keuangan Negara membahas “proses politik pemerintahan” dalam upaya menjabarkan pesan tujuan

bernegara (mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai amanat paragraf 4 Pembukaan UUD 1945). Proses politik adalah proses untuk memperoleh kesepakatan politik (melalui lembaga negara/DPR) dalam mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi bangsa kearah mana (keberpihakan politik kepada apakah sektor pertanian atau manufaktur atau berorientasi ke Pemerintah Pusat atau Daerah dll) dan dengan cara bagaimana mencapainya (teknokrasi dari orientasi keberpihakan politis pemerintah).

Untuk mewujudkan tujuan “*social benefit*” memerlukan teknologi untuk memastikan tercapainya Visi Negara (alinea 4 Pembukaan UUD 1945), Tujuan Pemerintah (Visi Presiden terpilih dan implementasinya pada Masa Pemerintahan sang Presiden), Kebijakan, Program dan Kegiatan (sebagai satuan kegiatan operasional pemerintahan).

Ilmu Keuangan Negara bermaksud memberi pengetahuan dan keterampilan kepada “Pejabat Publik dan Pegawai Negeri” tentang bagaimana memformulasikan kebijakan (*policy formulating/merancang kebijakan*), menyusun kebijakan dengan membuat ketentuan pelaksanaannya (*policy forming*), melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan (*implementing*) dan kemudian evaluasi (*evaluating*) sebagai pertanggung jawaban agar lebih mendekati kepastian dalam upaya mencapai tujuan mensejahterakan rakyat sebagai amanat pembukaan UUD 1945.

Manajemen ekonomi adalah instrumen strategik untuk membangun cara pandang pengelola negara dan pemerintahan berdasarkan skala prioritas dengan berbagai premis yang nyata sehingga mampu membangun kebijakan publik fiskal/ keuangan negara yang berfungsi sebagai pengungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Cloudnomics: Menguk Peluang Ekonomi dari Komputasi Awan

Oleh: Acwin Hendra Saputra -
Pelaksana Sekretariat BPPK

Internet disrupted the music business; Google disrupted the media; Cloudbased companies could become disrupters in other inefficient industries - The Economist (2008)

Era internet hadir dan memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas terutama karena internet memberikan kesempatan bagi munculnya berbagai teknologi baru. Beragam teknologi baru di bidang teknik produksi dilakukan melalui penggabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan jaringan, server dan aplikasi berbasis internet yang biasa disebut sebagai Komputasi Awan (*Cloud*

Computing). Teknologi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*added value*) yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui efisiensi penggunaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai sebuah tren baru di bidang komputasi terdistribusi, berbagai pihak dapat berkolaborasi untuk mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA (*Service Oriented Architecture*) melalui jaringan internet.

Literatur Ekonomi terkait Komputasi Awan

Meskipun dampak sosial dan ekonomi dari implementasi teknologi komputasi awan begitu besar, namun masih sedikit

literatur yang membahas topik komputasi awan dari sisi ekonomi. Pada sebuah jurnal ekonomi yang membahas tentang dampak makroekonomi dari komputasi awan yang ditulis oleh Federico Etro (2009) hanya ditemukan tiga literatur pendukung, yaitu Ghodsi, dkk. (2010), Friedman, dkk. (2011) dan Langford dkk. (2009) yang semuanya membahas mengenai aplikasi dari *cooperative bargaining theory* dan desain mekanisme atas aspek spesifik dari komputasi awan. Sedangkan literatur ekonomi yang secara langsung menyentuh aspek empirik terutama terkait peran komputasi awan dalam organisasi industri

menekan biaya, serta peningkatan tingkat pemanfaatan sumber daya. Secara umum keseluruhan efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi komputasi awan akan memberikan penghematan atas biaya operasional dalam skala yang cukup besar. Bahkan pada perusahaan baru biaya tetap (*fixed cost*) yang harus ditanggung untuk memulai atau memasuki bisnis (*entry business costs*) dapat secara signifikan ditekan dengan penggunaan teknologi komputasi awan. Hal tersebut akan merangsang tumbuhnya perusahaan-perusahaan pemula (*startups*) karena rendahnya biaya modal untuk

Perhitungan Manfaat Ekonomi	
Penelitian	Dampak kuantitatif dari Implementasi Komputasi Awan
The Economic Impact of Cloud Creation on Business Creation, Employment and Output in Europe, Federico Etro, 2009.	Menemukan bahwa implementasi komputasi awan berkontribusi terhadap <i>annual growth rate of Europe</i> antara 0,05 % sampai dengan 0,3 %.
The Cloud Dividend – The economic benefit of cloud computing to Business and the wider EMEA economy, Centre for Economics and Business Research, 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Implementasi komputasi awan diprediksikan menyumbang 763 Milyar atau 1,57 % dari total PDB kumulatif dari Inggris, Jerman, Italia dan Spanyol sepanjang periode 2010 – 2015 (rata-rata 0,3 % per tahun). ▶ Meningkatkan tingkat efisiensi dari rata-rata pekerja sebesar 2,1 %.
Economic Impact of Cloud Computing White Paper, Professor Marco Lansiti (Harvard Business School) Ana Gregory Richards (Keystone Strategy).	Meningkatkan PDB Amerika Serikat dalam besaran antara 0,83 % - 0,99 % per tahun (diprediksi 8,64 % sampai 10,37 % sepanjang satu dekade ke depan).
Saving Money through Cloud Computing, Darrell West (Brookings Institution), 2010.	Penghematan pada belanja Teknologi Informasi pada Pemerintah Amerika Serikat dengan besaran estimasi penghematan sebesar 25 sampai dengan 50 %.

Tabel. 1

ditemukan pada 4 literatur seperti yang ditampilkan pada Tabel.1.

Peluang Ekonomi dari Komputasi Awan

Pendekatan ekonomi pada komputasi awan akan berfokus pada pengurangan biaya (*cost reductions*), peningkatan efisiensi melalui *economies of sale*, distribusi biaya melalui kolaborasi *pool* pengguna yang besar, sentralisasi infrastruktur yang akan

pendirian perusahaan baru. Merujuk pada beberapa manfaat ekonomi dari penerapan komputasi awan, maka tidak mengherankan bahwa beberapa peneliti menyebutkan bahwa teknologi komputasi awan merupakan satu teknologi baru yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Adapun secara umum kita dapat mengklasifikasikan manfaat ekonomi dari komputasi awan sebagai berikut:

1. Penghematan Biaya Langsung (*Direct Cost Savings*)

Berbicara mengenai aspek ekonomi pada komputasi awan, maka penghematan atas biaya langsung (*direct cost savings*) yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah manfaat ekonomi terbesar dan paling mudah untuk diidentifikasi.

Penghematan ini pada skala organisasi perusahaan adalah penghematan dari belanja TI, melalui konversi biaya tetap (*fixed cost*) teknologi informasi menjadi biaya variabel (*variabel cost*) yang berupa penghematan dalam pembelian investasi awal pada infrastruktur TI serta adanya penghematan dalam biaya operasional pemeliharaan TI. Sedangkan pada skala umum atau eksternal, penerapan teknologi komputasi awan akan mewujudkan *economies of scale* di mana banyak perusahaan dapat secara bersama-sama menekan biaya *input* produksi (belanja TI) dalam proses produksinya. Ben Kepes (2010) menyimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat bentuk penghematan biaya langsung dari penerapan komputasi awan, yaitu:

- ▶ Menurunkan *opportunity cost* dari penerapan teknologi komputasi awan;
- ▶ Memberikan kemungkinan adanya pergeseran dari *capital expenditure* (capex) menjadi *operating expenditure* (opex);
- ▶ Menurunkan biaya total kepemilikan teknologi (*total cost of ownership*) perusahaan;
- ▶ Memberikan kesempatan perusahaan menambahkan *business value* dengan memperbaharui fokus pada *core activities*-nya.



Grafik 1. (Sumber: <http://www.voip-telephone-system.com>)

2. Peningkatan Produktivitas (*Productivity Improvements*)

Dampak teknologi baru pada produktivitas telah banyak dibahas dan diteliti. Pada tahap awal dari pengenalan sebuah teknologi baru pada sebuah bisnis akan memiliki efek *disruption* berupa adanya penurunan produksi sementara untuk sementara waktu sampai teknologi baru tersebut benar-benar bisa diintegrasikan. Teknologi komputasi awan akan dapat mengurangi efek *disruption* ini karena perusahaan tetap dapat memfokuskan diri pada proses bisnisnya tanpa harus terbebani permasalahan implementasi teknologi baru yang ditangani langsung oleh penyedia jasa teknologi komputasi awan. Pihak manajemen akan memiliki waktu lebih banyak untuk berfokus pada aktivitas strategis dan *marketing* jika berhasil menerapkan komputasi awan. Dengan sifat komputasi awan yang berkarakteristik *service oriented architecture* maka *gap* waktu dari penerapan teknologi baru dapat dipangkas dan perusahaan dapat secara langsung menikmati manfaat peningkatan produktivitas secepat mungkin.

Peningkatan produktivitas juga dapat dilihat melalui pertumbuhan pada *total factor productivity* (TFP) setelah penerapan komputasi awan. Stephen D. Oliner dan Daniel E. Sichel (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ini didapatkan karena berkurangnya biaya pengembangan TI sebagai imbas dari kolaborasi di antara banyak pengguna dan berkurangnya kompleksitas dalam upaya pengembangan suatu *software* yang dibangun untuk tujuan peningkatan produktivitas. Sumber pertumbuhan TFP lainnya adalah dengan implementasi teknologi komputasi awan akan meningkatkan *share market* bagi penjualan baik *software* dan teknologi komputasi awan kepada usaha kecil dan menengah. UKM dapat mengakses teknologi baru untuk menunjang produktivitas dengan berkolaborasi bersama melalui teknologi komputasi awan.

3. Pertumbuhan pada *Multi Factor Productivity*

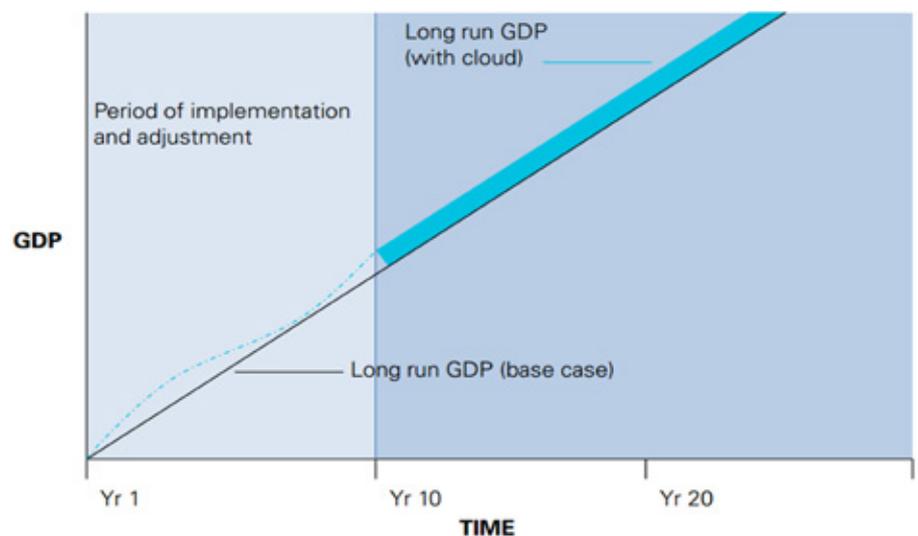
Penerapan teknologi komputasi awan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas individual perusahaan. Dalam risetnya yang diterbitkan dalam *German Economic Review* (2007) John Fernald dan Susanto Basu menyimpulkan bahwa penerapan komputasi awan pada sektor Industri di Amerika Serikat memberikan pertumbuhan pada *multi factor productivity* yang mencakup lima hal berikut:

- ▶ Peningkatan produktivitas dengan menerapkan model bisnis *outsourcing* pada kegiatan *non core service* perusahaan;
- ▶ Meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan mendorong inovasi;
- ▶ Meningkatkan fleksibilitas dan daya saing (*competitiveness*) bisnis perusahaan;
- ▶ Peningkatan kemampuan *business intelligence* perusahaan dari implementasi teknologi komputasi awan akan meningkatkan *responsiveness top* manajemen

terhadap perubahan pasar dan berimbang pada pengambilan keputusan yang lebih baik;

- ▶ Teknologi komputasi awan dapat menciptakan peluang tumbuhnya pebisnis-pebisnis baru dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah.

Grafik 2 (Sumber: sumber gambar: kpmg Australia)



Pengaruh Penerapan Komputasi Awan pada Produk Domestik Bruto (PDB)

Sebuah riset dari *Australian Information Industry Association* pada tahun 2012 yang menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) pada perekonomian Australia memberikan sebuah analisis kuantitatif dari penerapan teknologi komputasi awan serta dampak potensialnya terhadap perekonomian Australia selama satu dekade ke depan. Dampak penerapan teknologi komputasi awan di sektor industri Australia terhadap potensi peningkatan produktivitas pada PDB jangka panjang Australia dapat digambarkan pada Grafik 2.

Grafik 2 menjelaskan bahwa efisiensi pada *capital* dan *operating expenditures* (CapEx dan OpEx) akan terakumulasi sebagai

pertumbuhan pada PDB jangka panjang. Sehingga dalam periode 10 tahun ke depan perekonomian Australia akan menikmati penghematan belanja dari efisiensi CapEx dan OpEx. Penghematan biaya baik kapital maupun operasional akan mendorong pertumbuhan perekonomian lebih efisien dalam proses pencapaian *output* nasionalnya. Potensi efisiensi ini sebaiknya mulai ditangkap baik oleh para pelaku bisnis (swasta) dan Pemerintah untuk bisa melakukan kajian lanjutan bagi upaya-upaya adopsi teknologi komputasi awan ini.

Tantangan bagi Upaya Adopsi Teknologi Komputasi Awan

Meskipun komputasi awan menawarkan berbagai peluang dan potensi bisnis yang besar dari efisiensi pembiayaan, namun upaya implementasinya tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai kondisi yang merujuk pada kondisi pasar Indonesia, regulasi/kebijakan terkait komputasi awan, kondisi politik nasional, penguasaan teknologi oleh putra-putri bangsa dan isu-isu tentang keamanan data akan menjadi tantangan bagi keberhasilan penerapan teknologi komputasi awan di Indonesia. Para pembuat kebijakan di negeri ini dan para pemimpin bisnis akan menghadapi paling tidak tiga isu utama terkait teknologi komputasi awan.

I. Tantangan di Bidang Teknologi

Ambrust, dkk (2009) mengklasifikasikan tantangan penerapan teknologi komputasi awan menjadi dua kategori:

- ▶ Implementasi teknologi baru: dari sisi teknis pada penerapan teknologi baru titik kritisnya terletak pada reabilitas dari teknologi itu sendiri. Setiap kegagalan dari penerapan teknologi baru pada layanan utama sebuah bisnis harus mendapatkan porsi perhatian terbesar sebelum memutuskan menggunakan sebuah teknologi baru;
- ▶ Tantangan kedua merujuk pada potensi pertumbuhan teknologi komputasi awan terdapatnya *risk*

management yang terukur saat komputasi awan benar-benar akan diterapkan.

Resiko kegagalan akan selalu ada mengingat teknologi komputasi awan ini masih relatif baru. Kemungkinan masalah bisa terjadi pada hal-hal yang menyangkut transfer data, ketidakpastian kinerja (baik *hardware* maupun keandalan jaringan), terdapatnya *bugs* saat penyimpanan data, juga isu kecepatan dari layanan komputasi awan itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal ini maka harus ada kebijakan terkait standar mutu layanan komputasi yang jelas yang harus dipenuhi oleh para penyedia jasa layanan komputasi awan, termasuk adanya klausul *disaster management* yang jelas atas layanannya. Hal lain yang harus disiapkan adalah kesiapan sumber daya manusia pengelola teknologi komputasi awan serta kajian-kajian teknologi agar muncul berbagai inovasi untuk penerapan teknologi ini.

II. Tantangan terkait Regulasi

Isu regulasi yang menyertai teknologi komputasi awan pada dasarnya akan mengarah pada kebutuhan terdapatnya regulasi pasar (*market regulation*) yang memadai. Karena teknologi komputasi awan masih tergolong baru dan belum banyak perusahaan-perusahaan yang mampu menyediakan jasa teknologi ini secara *reliable*, maka pemerintah harus bisa memastikan tidak akan terjadi potensi monopoli dari segelintir pihak yang sudah terlebih dahulu menguasai teknologi ini. Intervensi pasar dari pemerintah sangat diperlukan dengan mengeluarkan kebijakan terkait kompetisi bisnis di sektor komputasi awan untuk memastikan tidak ada dominasi pasar oleh pihak-pihak tertentu, terciptanya pasar "*cloud computing*" yang kompetitif, dan tidak ada kerugian dari para pengguna teknologi komputasi awan karena potensi monopoli.

Khusus untuk pemerintah, kebijakan ekonomi (baca: perpajakan) atas tumbuhnya pasar baru dari berkembangnya teknologi komputasi awan harus segera disiapkan.

Kebijakan ini terutama harus dapat memberikan definisi yang jelas atas apa itu yang dimaksud dengan obyek pajak pada bisnis komputasi awan. Hal ini menjadi penting karena bentuk jasa yang berupa layanan digital akan lebih mendominasi pada bisnis komputasi awan, sehingga akan lebih sulit dalam upaya penentuan obyek pajaknya. Letak perusahaan penyedia jasa komputasi awan baik badan hukum maupun fisik perusahaan yang saat ini hampir sebagian besar tidak berada di wilayah NKRI dapat memicu terjadinya potensi konflik terkait klaim pajak antara negara kita dengan negara lokasi perusahaan penyedia jasa komputasi awan ini berada.

Letak penyedia yang berada di luar wilayah geografis Indonesia akan menyebabkan terjadinya transaksi bisnis secara *online* yang tidak terjadi di wilayah pabeian Indonesia. Kondisi-kondisi ini menjadi contoh betapa regulasi akan pertumbuhan teknologi komputasi awan hendaknya harus segera mendapat porsi perhatian yang besar karena kemajuan teknologi tidak akan bisa menunggu dan dihindari serta menjadi permasalahan baru tidak hanya di Indonesia namun juga dibanyak negara lainnya.

III. Keamanan dan Privasi Data

Isu paling mendasar dari lahirnya teknologi komputasi awan ini adalah pada masalah keamanan data. Sebab jika banyak data milik pemerintah dan swasta mulai dipindahkan ke *cloud*, maka fokus yang akan menjadi perhatian adalah pada adanya jaminan akan keamanan (*security*) dan privasi data yang diserahkan. Karena bukan tidak mungkin data-data yang disimpan melalui komputasi awan adalah data-data penting atau data rahasia perusahaan atau Pemerintah. Skandal penyadapan oleh *National Security Agency* (NSA) Amerika yang terungkap pada tahun 2013 lalu menunjukkan teknologi komputasi awan tidak bisa benar-benar dapat dinyatakan aman. Bisa saja saat terbukti ada satu upaya penyadapan data akan mendorong kegagalan pasar. Masalah mengenai keamanan dan privasi data ini akan

lebih tepat dikaji sebagai *principal-agent problem*, di mana akan ada tuntutan lebih bagi para pengguna teknologi komputasi awan untuk dapat membedakan dengan baik mana penyedia jasa komputasi awan yang aman dan tidak aman. Salah satu solusi untuk mengurangi beban dari permasalahan ini adalah ditetapkannya suatu regulasi terkait standar keamanan data dan prosedur penegakan hukum saat terjadi upaya penyadapan. Asosiasi perusahaan jasa layanan teknologi komputasi awan dapat didorong untuk membuat standar tertentu sebagai standar pelayanan keamanan dan privasi terkait layanan.

Kesimpulan

Teknologi komputasi awan menjanjikan potensi bagi peningkatan efisiensi produksi hingga potensi pertumbuhan pada PDB jangka panjang. Meski demikian teknologi ini karena relatif baru tidak begitu saja bisa diterapkan. Kita tidak dapat menghindari dari datangnya teknologi komputasi awan, atau kita akan tersingkir karena kita tidak dapat memanfaatkan peluang efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi ini. Berbagai regulasi dan kebijakan harus benar-benar kita siapkan dengan baik agar teknologi baru ini dapat diimplementasikan dengan baik dengan resiko seminimal mungkin. Dan tidak lupa penguasaan teknologi dan *transfer of knowledge* harus sedini mungkin kita lakukan.



Komunikasi Data Digital Menggunakan Jaringan Listrik

Oleh: Suharyadi -
Pranata Komputer di Sekretariat BPPK

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan transmisi data baik di jaringan lokal maupun internet telah menjelma menjadi suatu kebutuhan utama bagi para pekerja sektor formal maupun informal. Media transmisi data yang biasa digunakan dalam proses transmisi data dapat dibagi dalam tiga jenis media yaitu kabel, udara dan cahaya. Kabel merupakan media transmisi yang cukup banyak digunakan dalam proses transmisi data walaupun beberapa waktu belakangan ini dominasi kabel sebagai media transmisi data sudah mulai digeser

oleh teknologi *wireless* yang memanfaatkan udara sebagai media transmisi data

Pemicu terjadinya pergeseran penggunaan media transmisi data disebabkan beberapa faktor seperti terbatasnya jarak optimal yang dapat dijangkau oleh kabel, proses instalasi yang rumit dan memakan banyak waktu dan biaya, serta proses *maintenance* dan *troubleshooting* yang cenderung rumit. Selain itu ditinjau dari sisi estetika penggunaan kabel dalam jumlah besar di dalam suatu ruangan juga dapat mengurangi nilai estetika ruangan tersebut

apabila instalasi kabel tersebut tidak tertata dengan baik. Berbagai permasalahan dalam penggunaan kabel sebagai media transmisi data tersebut memicu beberapa orang penggiat teknologi untuk memanfaatkan jaringan listrik sebagai media transmisi data menggantikan media kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) yang biasa digunakan dalam jaringan komputer.

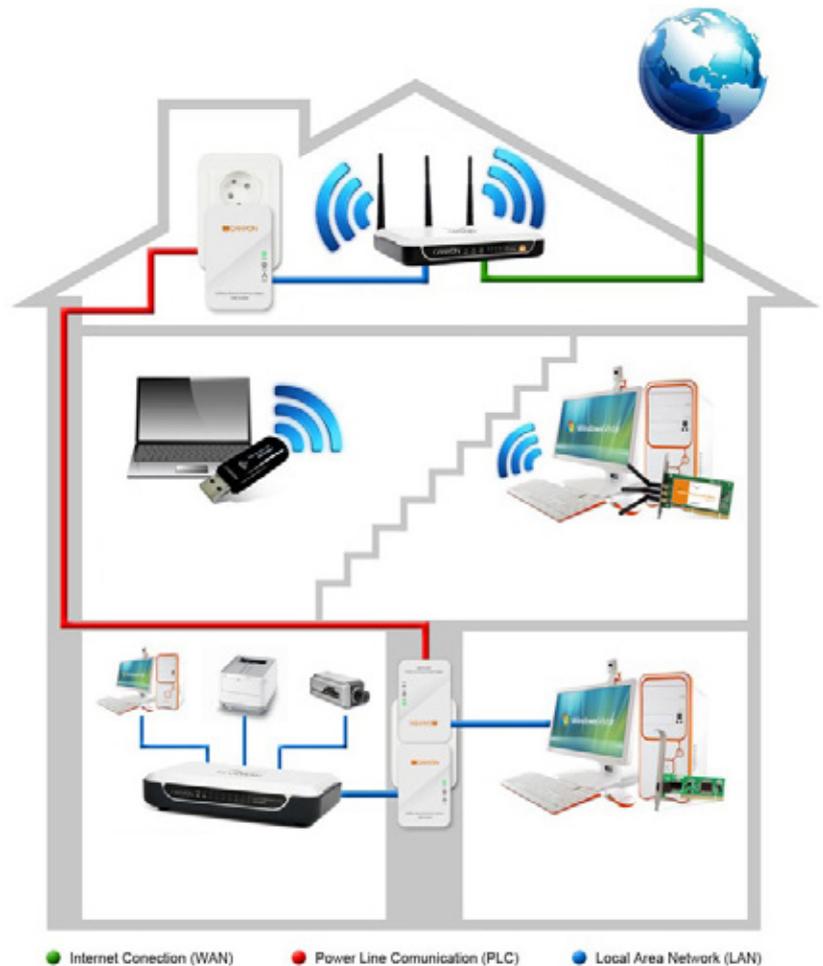
Adalah Dr. Paul Brown beserta tim yang merupakan sekelompok peneliti yang bekerja untuk Norweb pada tahun 1991 mulai melakukan penelitian tentang penggunaan jaringan listrik untuk transmisi data. Beliau menemukan fakta bahwa banyak peneliti lain yang telah melakukan penelitian serupa namun selalu menemukan kegagalan yang disebabkan *noise* yang sangat tinggi. Setiap kali kabel dialiri arus listrik, sejumlah besar gelombang distorsi listrik melewati kabel dan mengubah setiap data yang ditransmisikan secara simultan.

Berkaca dari hal tersebut, Dr. Paul Brown menerapkan strategi yang berbeda yaitu dengan menggunakan sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi yang berpotensi menghasilkan *noise*. Selain itu frekuensi yang digunakan lebih dari satu frekuensi dan paket data yang dikirim terdiri dari paket-paket diskrit yang dipandu oleh beberapa bentuk sistem pensinyalan. Strategi ini berhasil diuji coba dengan baik pada beberapa sekolah di Inggris dengan menghasilkan kecepatan transfer data yang sepuluh kali lebih cepat dari sambungan ISDN yang telah ada. Sejak itu teknologi ini terus dikembangkan dan disempurnakan hingga saat ini. Teknologi ini dikenal dengan sebutan *Power Line Communication*.

Sekilas melakukan transfer data digital dengan menggunakan kabel listrik sangat tidak mungkin untuk dilakukan, tapi saat ini hal tersebut bukan suatu hal yang mustahil lagi. Saat ini kita dapat menghubungkan kabel UTP yang terhubung ke perangkat elektronik langsung ke stop kontak listrik untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang

terletak di ruangan lain dan tentu saja kita juga dapat melakukan koneksi internet melalui kabel listrik dengan memanfaatkan teknologi *Power Line Communication*. Untuk dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan sebuah perangkat tambahan bernama *Powerline Ethernet Adapter*. *Powerline Ethernet Adapter* berfungsi untuk mengubah frekuensi arus listrik yang mengalir dalam kabel listrik sehingga dapat digunakan untuk melakukan transmisi data digital. Untuk dapat lebih memahami cara kerja dari teknologi *Power Line Communication* perhatikan gambar 1.

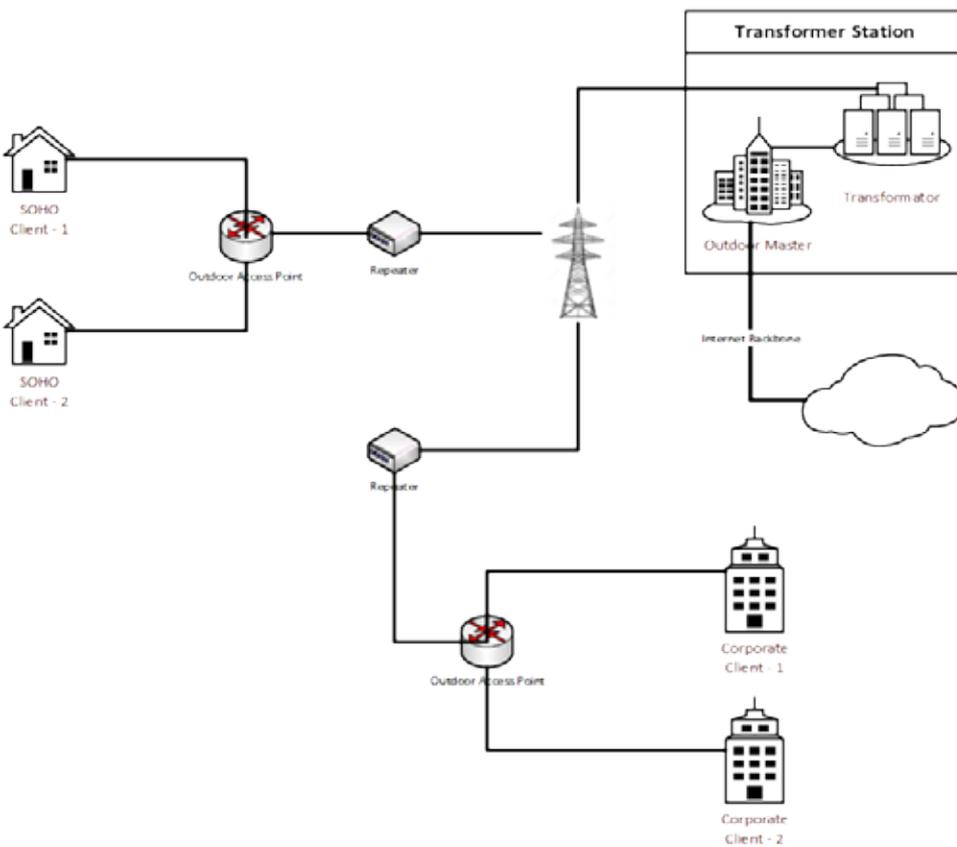
Gambar 1 : Power Line Communication



LAN Schema

Sumber: <http://www.canyon-tech.com/>

Gambar diatas merupakan konsep sederhana dari penerapan teknologi *Power Line Communication* pada lingkungan terbatas (*Local Area Network*). Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, untuk menghubungkan jaringan dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya anda tidak perlu direpotkan dengan instalasi kabel jaringan. Cukup dengan menggunakan Powerline Ethernet Adapter yang dihubungkan dengan stop kontak listrik maka berbagai perangkat anda sudah dapat terhubung satu sama lain. Yang perlu digaris bawahi disini adalah, skema tersebut merupakan skema yang digunakan untuk jaringan local sehingga untuk kebutuhan akses internet anda tetap harus berlangganan internet dari ISP (*Internet Service Provider*).



Gambar 2 : Power Line Communication Enterprise

Penerapan teknologi *Power Line Communication* untuk kebutuhan yang lebih besar dapat dilakukan dengan cara menghubungkan *backbone* internet ke *Outdoor Master*. Sebelum sinyal data didistribusikan ke para pengguna oleh *Outdoor Master*, sinyal data akan dikirim ke *Concentration Unit* dan *Transformator* distribusi listrik untuk menurunkan tegangan listrik yang tinggi (12KV) menjadi listrik bertegangan rendah (380 V) . Setelah berubah menjadi listrik bertegangan rendah, sinyal data akan segera di kirim ke para pengguna teknologi *Power Line Communication* dengan cara ditumpangkan pada kabel listrik. Terkait dengan jauhnya jarak antara lokas *Outdoor Master* dengan lokasi pengguna maka diperlukan sebuah *repeater* yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang melemah.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan skala besar tersebut, kita tidak dapat melakukannya sendiri karena yang berhak untuk melakukan pengelolaan tenaga listrik di Indonesia adalah PLN (Perusahaan Listrik Negara). Melihat potensi yang besar ini, PLN tidak tinggal diam. Melalui salah satu anak perusahaannya yang bernama PT. Indonesia Comnet Plus (ICON+) menyediakan layanan penyediaan jaringan dan konten telekomunikasi khusus untuk mendukung teknologi dan sistem informasi PLN dan sektor publik lainnya. ICON+ mengandalkan berbagai layanan unggulan seperti *Clear Channel*, *Multi Protocol Label Switching (MPLS)* dan akses internet *broadband*. Dengan infrastruktur jaringan serat optik sepanjang 891.000 km meliputi Jawa, Bali, Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi dan didukung dengan pendayagunaan hak jaringan ketenagalistrikan milik PLN di seluruh wilayah Nusantara, ICON+ mampu melayani kebutuhan pelanggan dengan berbagai pilihan jaringan telekomunikasi yaitu *Clear Channel Network*, *VPN IP*, *Metronet* dan *Internet Corporate*.

Tabel 1 : Perbandingan Teknologi PLC (*Power Line Communication*) dengan HPNA (*Home Phoneline Networking Alliance*)

	HPNA (Home Phonline Networking Alliance)	PLC (Power Line Communication)
Media Transmisi	Kabel Telephone	Kabel Listrik
Spesifikasi & Organisasi Standar	Home Phonline Networking Association HomePNA 1.0 HomePNA 2.0	Belum ada standar yang baku. Masing-masing produsen perlengkapan PLC menggunakan standar sendiri
Kecepatan Transmisi Data	HPNA 1.0 up to 1 Mbps HPNA 2.0 up to 2 Mbps	Up to 10 Mbps
Kompatibilitas dengan teknologi jaringan komputer yang lain	Ya	Ya
Frekuensi yang digunakan	2 MHz	1 – 30 MHz
Keunggulan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Installasi mudah ▶ Menggunakan kabel existing ▶ Kompatibel dengan teknologi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Installasi mudah ▶ Menggunakan kabel existing ▶ Kompatibel dengan teknologi lainnya ▶ Jangkauan lebih luas dibanding dengan HPNA ▶ Kecepatan akses lebih tinggi dibanding dengan HPNA
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kecepatan akses rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interferensi ▶ Lonjakan listrik, naik turunnya tegangan listrik mempengaruhi kinerja jaringan

Secara teknis, kendala utama yang dihadapi dalam penggunaan teknologi *Power Line Communication* terletak pada masalah interferensi. Masalah interferensi disebabkan oleh penggunaan band frekuensi. Band frekuensi yang digunakan dalam teknologi *Power Line Communication* sama dengan band frekuensi yang digunakan untuk sistem komunikasi *short wave radio* seperti radio broadcasting, komersial, militer, maritime, navigasi dan stasiun radio amatir. Hal ini akan menimbulkan *Electro Magnetic Interference* yang dapat mengganggu sistem komunikasi radio.

ACMA (*Australian Communications and Media Authority*) pada tanggal 14 Juli 2006 pernah melakukan pengukuran interferensi yang ditimbulkan oleh teknologi *Power Line Communication*. Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa interferensi yang disebabkan oleh jaringan *Power Line Communication* melebihi batas radiasi gelombang elektromagnetik yang telah ditentukan oleh FCC (*Federal Communications Commissions*).

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan teknis dan non teknis. Pendekatan teknis yang dapat dilakukan untuk mereduksi interferensi yang ditimbulkan oleh jaringan *Power Line Communication* yaitu

1. Menggunakan kabel listrik *shield cable* atau menggunakan kabel listrik bawah tanah. Solusi ini akan dapat mereduksi interferensi yang di hasilkan oleh jaringan *Power Line Communication* secara signifikan, akan tetapi solusi ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena sebagian besar jaringan listrik tegangan menengah yang terpasang pada tiang listrik menggunakan *unshield cable*
2. Mengurangi daya transmisi. Dengan mengurangi daya transmisi maka secara otomatis interferensi yang dihasilkan akan berkurang. Namun hal ini bukanlah solusi yang baik karena

pengurangan daya transmisi akan menyebabkan jarak transmisi sinyal akan berkurang dan rentan terjadi noise pada jaringan distribusi listrik.

3. Menggunakan perlengkapan *Power Line Communication* yang telah dilengkapi dengan kemampuan pengaturan daya secara otomatis (*self power adjustment*).

Solusi ini merupakan solusi terbaik yang dapat diterapkan untuk mereduksi interferensi yang disebabkan oleh jaringan *Power Line Communication*. Namun yang perlu menjadi catatan disini adalah peralatan yang telah dilengkapi dengan teknologi *self power adjustment* masih sangat terbatas dan harganya pun masih sangat tinggi

Sedangkan pendekatan non teknis yang dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah interferensi ini adalah dengan menetapkan regulasi yang mengatur penggunaan spectrum frekuensi 1.7 – 300 MHz. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah interferensi antara sistem *Power Line Communication* dengan komunikasi radio. Solusi ini merupakan solusi yang paling mungkin untuk dilakukan karena tidak membutuhkan biaya yang besar dalam penerapannya.

Di lingkungan kementerian keuangan sendiri, teknologi *Power Line Communication* belum pernah digunakan. Dapat dibayangkan berbagai kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi ini. Mulai dari instalasi yang mudah, kecepatan akses yang tinggi, sampai dengan meningkatnya nilai estetika suatu ruangan karena permasalahan kabel-kabel jaringan yang malang melintang sudah pasti tidak akan terjadi lagi.



Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Babak Baru Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

Oleh: Abu Samman Lubis -
Widyaiswara BDK Malang

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998, telah memporakporandakan perbankan Indonesia dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang dikenal sebagai krisis moneter, salah satu isu penting adalah lahirnya ide untuk dapat menjadi dasar reposisi fungsi Bank Indonesia (BI) untuk kembali ke khitahnya, yakni menjaga stabilitas moneter.

Sebelum lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), model pengaturan dan pengawasan jasa keuangan terdapat diberbagai instansi seperti pengawasan perbankan dilaksanakan oleh BI, sedangkan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan RI.

Dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah, supervisi tidak terintegrasi. Walaupun supervisi dilaksanakan dengan

baik di satu sisi, tetapi belum tentu dilaksanakan dengan baik di sisi yang lain. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri keuangan secara keseluruhan, terutama apabila terjadi *trouble* di salah satu sektor dalam industri keuangan.

Skema pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan, mengingat telah berkembangnya tren perusahaan konglomerasi. Seperti konglomerasi Sinar Mas Group dengan anak perusahaannya antara lain bank Sinar Mas, Asuransi Sinar Mas, Asuransi Jiwa Sinar Mas, dan *multifinance* Sinar Mas. Dalam bidang perbankan, misalnya bank Mandiri dengan anak perusahaannya: Mandiri Tunas Finance, Axa Mandiri, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya baik swasta maupun BUMN umumnya mempunyai anak-anak perusahaan yang membutuhkan pengawasan atas seluruh aktivitas lembaga keuangan dimaksud.

Pada sisi lain, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi kebutuhan akan adanya sistem pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, disebabkan beberapa hal, yaitu (1) efisiensi sistem pengawasan, teknologi, dan sumber daya manusia yang bermutu, (2) menyeimbangkan industri keuangan

swasta yang semakin terkonglomerasi, (3) globalisasi industri keuangan, (4) produk-produk keuangan semakin beragam dan kompleks sehingga sulit dibedakan, dan (5) pengawasan industri keuangan menjadi lebih terpadu dan terharmonisasi.

Oleh karena itu, terlepas apa yang telah terjadi (krisis moneter) perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks dan dinamis telah menuntut adanya sebuah lembaga independen di luar pemerintah yaitu OJK yang dapat mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Pembentukan OJK

Ide pendirian lembaga independen yang mengawasi seluruh aktivitas lembaga perbankan mengalami tarik ulur, dengan berbagai hambatan. Fakta menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan tarik ulur dari berbagai pihak terkait dengan pendirian OJK di Indonesia sebagai satu-satunya lembaga pengawasan jasa keuangan telah memakan waktu selama 12 tahun.

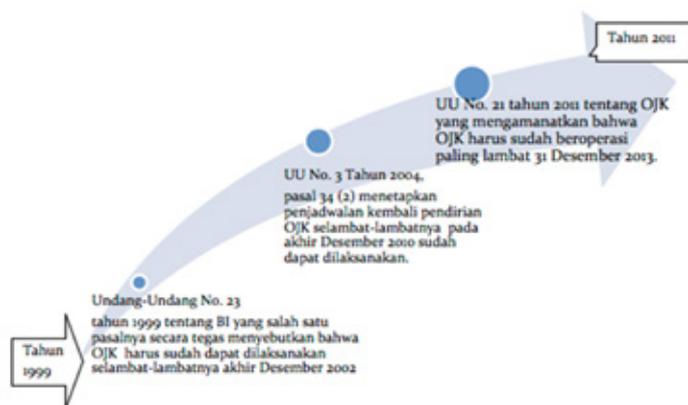
Pengesahan UU No. 21 Tahun 2011 menjadi landasan hukum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas Lembaga Jasa Keuangan.

OJK sebagai lembaga independen, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Wewenangnya antara lain melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan dan nonbank, serta memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat khususnya konsumen di sektor jasa keuangan.

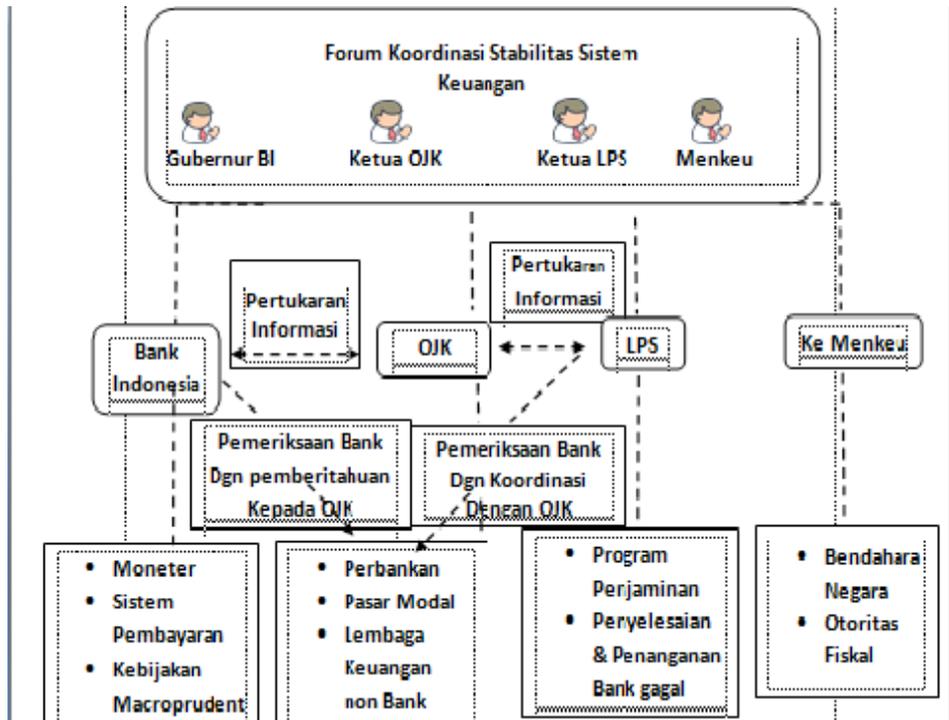
Bagaimana koordinasi antarlembaga independen dapat terlaksana?

OJK dapat mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Proses Pembentukan OJK



Model terintegrasi unit yang merupakan struktur sistem jasa keuangan di Indonesia



Sumber: Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-51 Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 20 November 2012

Terintegrasi artinya bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, BI, dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) saling berhubungan satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI, LPS atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, OJK akan berkoordinasi

dengan BI, LPS dan Kementerian Keuangan RI untuk mewujudkan sistem keuangan yang tahan terhadap krisis. Dalam hal ini OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. Namun demikian, "Bank yang kesulitan likuiditas" dalam pasal 41 ayat (2) UU OJK harus diperjelas penafsirannya, apakah akibat faktor sistemik atau kegagalan manajemen bank tersebut.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, BI, dan LPS wajib membangun, memelihara dan mengembangkan sarana pertukaran informasi secara terintegrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selanjutnya, selain melaksanakan koordinasi, ketiga lembaga tersebut, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Anggotanya terdiri atas: (1) Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, (2) Gubernur BI selaku anggota, (3) Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota, dan (4) Ketua Dewan Komisiner LPS selaku anggota.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam kondisi normal: (a) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan, (b) melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, (c) membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, dan (d) melakukan pertukaran informasi.

Sedangkan dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/ atau Ketua Dewan Komisiner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. FKSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan FKSSK yang terkait dengan penyelesaian

dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, mengikat LPS.

Yang dimaksud dengan “krisis pada sistem keuangan” berdasarkan Penjelasan UU No. 21 tahun 2011 adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Sedangkan yang dimaksud “bank gagal” adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Penutup

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah memunculkan sistem pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, yang selama ini model pengaturan dan pengawasan jasa keuangan terdapat diberbagai instansi seperti pengawasan perbankan dilaksanakan oleh BI, sedangkan Bapepam-LK beralih ke OJK. Artinya, mempunyai konsekuensi bahwa sebagian tugas dan wewenang BI, serta tugas dan wewenang Bapepam-LK menjadi wewenang dan tanggung jawab OJK.

Berkembangnya tren perusahaan konglomerasi, membutuhkan pengawasan atas seluruh aktivitas lembaga keuangan dimaksud. Koordinasi dan sinergi antara OJK, BI, LPS, dan Kementerian Keuangan RI diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tahan krisis.

Bangsa Besar

oleh: Agus Suharsono - Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Gambar: commons.wikimedia.org

Tidak banyak yang mengenal nama Temuchin, ia diperkirakan lahir tahun 1162 dari suku pengembara di dataran Mongolia. Tetapi jika disebut julukannya Jenghis Khan, banyak diantara kita yang mengenalnya. Temuchin adalah nama saat ia dilahirkan. Sebenarnya nama Temuchin adalah musuh besar bapaknya yang berhasil dikalahkan sebelum ia lahir. Walaupun bisa dikalahkan tetapi nama musuhnya itu disematkan pada anak laki-laknya.

Temuchin akhirnya bisa menyatukan bangsa Mongolia, kemudian membangun Kekaisaran Mongolia yang mampu menaklukkan sebagian besar wilayah Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Ia dijuluki Jenghis Khan atau Kaisar Semesta, karena luasnya wilayah taklukannya. Tahun 1227 Jenghis Khan meninggal dunia setelah terjatuh dari kudanya. Umurnya sudah lebih enam puluh tahun ia masih berperang dan naik kuda.

Kerajaan Mongolia kemudian diwariskan kepada Ogadai Khan, anak ketiganya. Anak pertama dan keduanya adalah

singa-singa yang ganas di peperangan, tetapi tidak dipilihnya. Ogadai Khan dipilih karena ia pandai bernegosiasi, mempunyai jiwa pemimpin dan rendah hati. Ia berhasil memperluas kerajaan Mongolia sampai ke Eropa. Jerman, sebagai cerminan Kekaisaran Romawi berhasil ditaklukkan, pasukan Mongolia terus memperluas kekuasaannya di Eropa dan Arab. Ketika Ogodei Khan meninggal, kerajaan Mongolia diteruskan oleh Kubilai Khan yang dikenal sebagai pendiri Dinasti Yuan.

Kebesaran Kerajaan Mongolia, tidak terbantahkan. Kerajaan-kerajaan besar pada jamannya berhasil ditaklukkan. Sejarah mencatat Kerajaan Mongolia sebagai kerajaan terluas. Tapi ada satu kerajaan yang gagal ditaklukkan oleh kebesaran Mongolia. Kerajaan itu tidak di Eropa atau Arab, tetapi ada di Nusantara. Kerajaan Mongolia gagal menaklukkan Kerajaan Singosari, saat ini berada di sekitar kota Malang, Jawa Timur.

Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222, awalnya bernama

Kerajaan Tumapel di kawasan Singosari sebelah utara kota Malang saat ini. Tetapi lebih dikenal dengan Kerajaan Singosari daripada Tumapel. Kerajaan Singosari mempunyai kisah tragis yang diyakini karena kutukan Mpu Gandring, pembuat keris pusaka yang dibunuh oleh Ken Arok. Keris itu sesuai kutukan Mpu Gandring akan membunuh Ken Arok dan keturunannya. Kutukan itu menjadi kenyataan, Ken Arok dan tujuh keturunannya saling bunuh karena berebut tahta.

Tahun 1272 Singosari dipimpin oleh Kertanegara, cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes. Suksesi Kertanegara dicatat sejarah sebagai satu-satunya suksesi damai dalam sejarah Singosari. Kertanegara memimpin Singosari sampai tahun 1292 dan berhasil membesarkan Kerajaan yang dikenal sebagai masa kejayaan Singosari. Kertanegara sudah mempunyai ambisi untuk menyatukan wilayah nusantara. Tahun 1275 Kertanegara mengirim Kebo Anabrang untuk memimpin ekspedisi untuk menaklukkan Sumatera agar bisa menguasai selat Malaka yang merupakan

jalur perdagangan strategis saat itu, ekspedisi tersebut dikenal dengan sebutan ekspedisi Pamalayu. Keinginan menguasai selat Malaka juga untuk membendung kekuasaan Mongolia yang saat itu dipimpin Dinasti Yuan. Mongolia sudah mulai menguasai seluruh daratan Asia dan menuju semenanjung Asia Tenggara.

Dugaan Kertanegara terjadi, tahun 1289 kerajaan Mongolia mengutus Meng Khi, meminta agar Kertanegara tunduk pada kekuasaan Mongolia dan menyerahkan upeti setiap tahunnya. Kertanegara menolak dengan keras, bahkan diceritakan Kertanegara memotong salah satu telinga Meng Khi. Dengan hati dan wajah terluka Meng Khi pulang melapor kepada pimpinannya, Kubilai Khan.

Ambisi Kertanegara menguasai Malaka ternyata tidak sepenuhnya didukung jajaran pemerintahannya. Para pejabat yang menentang cita-citanya kemudian dimutasi atau diturunkan jabatannya. Rakryan patih Mpu Raganata turun pangkat menjadi ramadhyaksa. Rakryan demung Arya Wiraraja dimutasi menjadi bupati Sumenep di Madura sebelah timur. Bukan hanya itu, ambisi Kertanegara yang mengejar kejayaan juga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan. Apalah arti kejayaan yang menjulang jika rakyatnya jadi sengsara karena harus membiayai perang. Besarnya pasukan yang dimiliki Kertanegara bisa memadamkan pemberontakan. Tapi lama-lama pasukannya melemah juga.

Jayakatwang sebenarnya masih kerabat Kertanegara ia menjabat adipati Kediri, tapi ingin memberontak. Jayakatwang tahu betul tabiat Kertanegara dan yang menjadi kelemahannya adalah kesukaannya minum-minum sampai mabuk. Saat Kertanegara mabuk itulah serangan dilakukan, Kertanegara gugur. Kertanegara mempunyai menantu Raden Wijaya, meski mertuanya kalah perang ia diampuni Jayakatwang berkat bantuan Arya Wiraraja dari Sumenep,

pejabat yang disingkirkan Kertanegara. Raden Wijaya oleh Jayakatwang tidak diperkenankan tinggal di Singosari, ia diberi sebuah hutan, Tarik namanya. Arya Wiraraja tidak tanggung-tanggung membantu Raden Wijaya, ia mengerahkan banyak prajuritnya dari Sumenep untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan Tarik menjadi pemukiman. Ditengah-tengah kerja memabat hutan tarik ditengah siang yang terik mereka sangat kehausan. Dikejauhan tampak sebatang pohon rindang dengan buah sebesar kelapa merah semburat, menyegarkan, itulah buah Mojo. Segera mereka memakannya, ternyata rasanya sangat pahit. Hutan tarik itu kemudian diberi nama Mojopahit, sekarang menjadi kota Mojokerto.

Tahun 1293, Kubilai Khan mengirim 20.000 tentara dengan 1.000 perahu yang dipimpin tiga panglima Shi Bi, Ike Mese, dan Gaoxing. Misinya satu, membunuh Kertanegara yang telah mempermalukan Meng Khi dan menolak membayar upeti. Pasukan tersebut mendarat di Pelabuhan Tuban. Shi Bi memecah pasukan menjadi dua, satu jalan darat dan satunya menyusuri sungai. Raden Wijaya melihat situasi ini sebagai sebuah kesempatan, ia bersekutu dengan pasukan Mongol dan mau tunduk untuk membayar upeti. Raden Wijaya menjadi penunjuk jalan dari Tuban menuju Singosari, hanya saja ia tidak mengatakan keadaan yang sesungguhnya bahwa Kertanegara telah meninggal dan digantikan Jayakatwang dalam sebuah pemberontakan. Singkat cerita pasukan Mongol berhasil mengalahkan Singosari, Jayakatwang, yang dikira Kertanegara. Pasukan Mongol berpesta pora. Raden Wijaya pamit hendak ke Mojopahit menyiapkan upeti. Gaoxing tidak setuju tapi dua panglima lainnya setuju.

Berangkatlah Raden Wijaya ke Mojopahit, ia meminta pasukan Mongol datang ke Mojopahit tanpa senjata untuk mengambil upeti pada hari yang telah

ditentukan. Sebelum pasukan Mongol datang, Raden Wijaya memobilisasi pasukan untuk menyerang pasukan Mongol, dan kalah telak.

Raden Wijaya menggerakkan pasukannya ke jantung pertahanan secara tiba-tiba. Pasukan Mongol terbunuh sekitar 3.000, sisanya lari kocar-kacir ke arah Tuban, naik perahu dan kembali ke Mongol. Mereka kalah untuk kedua kalinya.

Kubilai Khan sangat marah, jarang ia kalah dalam pertempuran, tapi ini dua kali ia kalah telak oleh sebuah kerajaan di Jawa yang tidak diperhitungkannya. Shi-bi dianggap gagal menjalankan misi, ia dihukum cambuk dan sepertiga hartanya disita untuk negara. Ike Mese juga dihukum dan sepertiga harta kekayaannya disita. Gaoxing, nasibnya baik, ia diberi hadiah 50 tael emas, karena dianggap melindungi pasukannya. Kegagalan mengalahkan Singosari merupakan ekspedisi terakhir. Berangsur-angsur kejayaan Mongol surut.

Jaman berganti, Mojopahit yang dulunya hutan Tarik, berkembang menjadi kerajaan besar yang nantinya menguasai Nusantara. Mojopahit mempunyai wilayah yang lebih luas dari Indonesia saat ini. Kita adalah keturunan bangsa yang besar, bangsa yang mampu mengalahkan Mongol ketika ia mampu menaklukkan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Sejarah selalu mengajarkan kita sebuah makna kehidupan. Kisah ini hanyalah sepenggal perjalanan bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha bangkit. Sukses pimpinan, sudah ratusan tahun lalu terjadi berulang. Nampaknya sejarah akan selalu terulang, ada yang menang ada yang tersisih. Ada yang dikenang ada yang tersingkir. Balas dendam juga subur di tanah kita, mungkin juga di institusi kita. Ada pahlawan, ada yang dikalahkan, ada pengkhianat, dan akan ada yang balas dendam. Itu bagian dari sejarah dan kita harus memilih. *Mengulang sejarah atau alternatif lain?*



Foto: M. Fath K.

Menjaga Kesehatan di Musim Pancaroba

oleh: Yohana Tolla

Musim pancaroba adalah masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Peralihan musim ini ditandai oleh keadaan udara yang tidak menentu, angin bertiup kencang, hujan sangat besar disertai guruh dan sebagainya. Kondisi cuaca bersuhu panas, kadang diselingi hujan lebat berangin membuat tubuh harus pandai untuk beradaptasi.

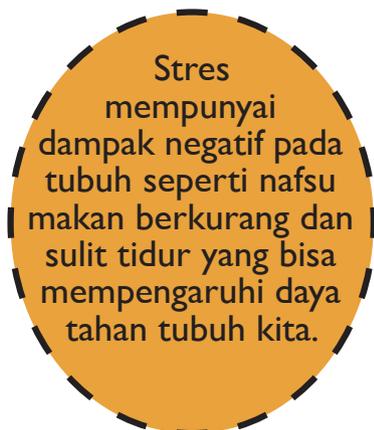
Suhu udara yang mudah berubah ini dapat menyebabkan turunnya daya tahan tubuh. Penurunan daya tahan membuat tubuh kita menjadi lebih mudah terserang penyakit. Beberapa penyakit yang timbul dimasa pancaroba diantaranya influenza, diare dan demam berdarah. Agar tubuh tetap fit dan mudah beradaptasi dengan kondisi di musim pancaroba ini, simak beberapa tips “berdamai” dengan kondisi buruk di musim pancaroba.

Konsumsi makanan bergizi

Daya tahan tubuh yang baik selain butuh makanan yang cukup jumlahnya, sehat dan bersih, juga harus memenuhi semua unsur gizi yang dibutuhkan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Hal ini dilakukan agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam memilih menu makanan jangan hanya mengutamakan kenyang dan berprotein tinggi. Makan yang teratur dan bergizi harus diutamakan. Selain membutuhkan protein, tubuh juga memerlukan gizi yang terkandung didalam sayur dan buah. Jadi jangan lupa juga untuk makan sayur dan buah.

Olahraga

Orang yang rentan terserang penyakit adalah orang yang kurang gerak, makan tidak teratur dan makan asal kenyang. Olah raga yang rutin dapat menjaga stamina tubuh. Maka mulailah berolahraga secara teratur sehari 30 menit, minimal untuk berjalan kaki. Pilih olahraga yang bersifat aerobik seperti jogging, senam, treadmill, bersepeda, atau sekedar berjalan kaki berkeliling kompleks atau pergi bekerja. Yang penting adalah pas-



tikan bahwa tubuh tetap aktif bergerak agar sirkulasi darah tetap lancar. Hal ini akan sangat membantu tubuh untuk tetap fit dan stamina tubuh terjaga baik.

Suplemen

Bila perlu, tambahkan suplemen dalam menu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pilih suplemen yang mempunyai kandungan vitamin C, Echinacea, dan Zinc. Namun patut diingat bahwa kebutuhan nutrisi ideal sesungguhnya sudah dapat terpenuhi dari asupan pola makan sehari-hari apabila kita telah menerapkan pola makan yang sehat.

Kelola stres

Stres mempunyai dampak negatif pada tubuh seperti nafsu makan berkurang dan sulit tidur yang bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Dengan belajar

mengelolanya secara tepat, kita dapat terhindar dari dampak negatif stres yang pada akhirnya mempengaruhi daya tahan tubuh kita.

Air putih

Mengonsumsi air putih secara rutin akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pastikan asupan cairan memenuhi kebutuhan keseharian tubuh kita. Tidak harus mengikuti mitos 8 gelas dalam sehari, cukup pastikan kebutuhan cairan Anda terpenuhi. Karena kebutuhan cairan setiap tubuh manusia memiliki ambang yang berbeda-beda. Tubuh akan memberikan sinyal kapan membutuhkan cairan - contohnya rasa haus - serta gejala tubuh dehidrasi. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, lesu dan letih.

Jaga kebersihan

Jagalah selalu kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biasakan mencuci tangan sebelum makan dan mencuci muka atau mandi setelah beraktivitas diluar rumah. Hal ini menghindari diri dari virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung ataupun kulit kita.



Foto: M. Fath K.

Untuk mencegah munculnya bibit-bibit penyakit jagalah kebersihan lingkungan. Mulailah dengan membersihkan kamar sendiri dan rumah secara rutin. Cucilah seprei, sarung bantal, guling dan lainnya seminggu 2 kali agar debu yang menempel tidak menumpuk. Lingkungan bersih identik dengan *buanglah sampah pada tempatnya*.

Cukup istirahat

Istirahat yang cukup sangat diperlukan setiap harinya agar tubuh benar-benar memiliki istirahat untuk mengembalikan energi yang telah dikeluarkan. Kurangnya istirahat dapat secara drastis menurunkan daya tahan tubuh kita. Selain itu, tidur dapat membantu mengistirahatkan otak, mendorong regenerasi sel-sel tubuh, dan membantu memulihkan stamina untuk beraktivitas. Tidur juga bisa menghilangkan stres serta memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki waktu tidur yang cukup untuk beristirahat di malam hari.

**disarikan dari berbagai sumber*



Foto: M. Fath K.

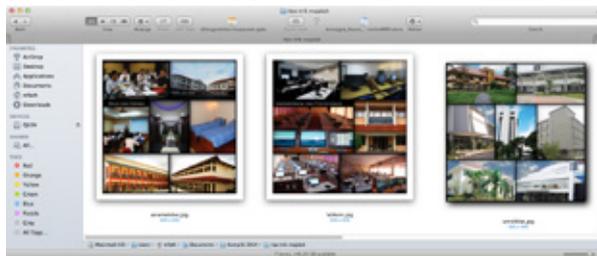
Membuat Katalog Bergambar dengan Mudah (pada *Windows & Mac*)

oleh: Muhammad Fath K.

Fungsi mail merge adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan yang disediakan oleh Microsoft Word. Mail merge seringkali digunakan untuk membuat surat dengan tujuan berbeda-beda. Kali ini penulis ingin berbagi pengetahuan terkait penggunaan Mail Merge, tapi dengan foto yang disisipkan di dalamnya. Perlu diperhatikan, bahwa semua data yang digunakan dalam pembuatan mail merge berikut harus disimpan dalam format Microsoft Word/Excel 97-2003 (Windows) atau Word/Excel 98-2004 (Mac), yaitu format .doc/.xls. Berikut cara membuatnya:

Langkah-langkah:

- 1 Siapkan terlebih dahulu file gambar untuk katalog dan simpan dalam folder yang sama dengan dokumen mail merge.



- 2 Buat data source di Microsoft Excel 2007 /2010 atau Excel 2008 (Mac) seperti contoh berikut ini dan simpan dalam format Excel 97 - 2003 (.xls) atau Excel 98-2004 (Mac), dengan nama **fasilitas**. Pastikan **Nama Gambar** sesuai dengan nama file gambar pada langkah 1.

Nomor	Fasilitas	Nama Gambar
1	Unit Diklat	unitdiklat
2	Laboratorium Komputer	labkom
3	Asrama dan kelas	asramakelas

- 3 Buka dokumen baru Word 2007/2010 (Mac: Word 2008). Buat dokumen master berupa tabel dengan data berikut dan simpan dalam format Word 97 - 2003 (.doc) atau Excel 98-2004 (Mac),

Nomor :	
Fasilitas :	

Catatan: dokumen Word dan Excel harus disimpan dalam format 97 - 2003 atau Excel 98-2004 untuk Mac, karena fitur **IncludePicture** yang akan digunakan pada mail merge gambar tidak bisa digunakan di Word selain versi tersebut (ada masalah *bug*).

- 4 Buka Mail Merge menu di Ms.Word. **Win:** **Mailings** tab, grup **Start Mail Merge**, klik **Start Mail Merge** dan pilih **Directory**. **Mac:** **Tools > Mail Merge Manager**.

- 5 Setelah itu sisipkan *data source* yang telah kita buat tadi. **Win:** Pada **Mailings** tab, grup **Start Mail Merge**, klik **Select Recipients**, Pilih **Use Existing List**, dan cari lokasi dokumen (**fasilitas.xls**) pada kotak dialog **Select Data Source**. Kemudian klik **Open**. **Mac:** Pada panel Mail Merge, **Create New > Catalog**, lalu **Get List > Open Data Source**, dan cari lokasi dokumen (**fasilitas.xls**) kemudian **Open**.

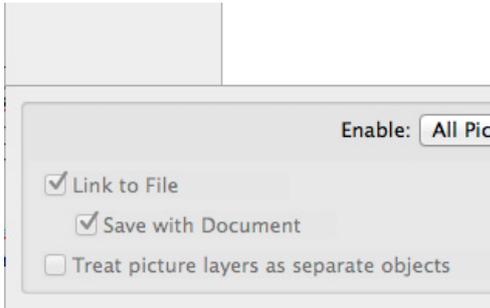
- 6 Sekarang kita akan menaruh data pada masing-masing tempatnya. Taruh kursor di samping tulisan "Nomor:". **Win:** Pada **Mailings** tab, grup **Write & Insert Fields**, klik **Insert Merge Field** dan pilih **Nomor**. **Mac:** taruh kursor setelah Nomor, klik pada "Nomor" di panel **Mail Merge Manager**.

- 7 Lakukan hal yang sama pada **Fasilitas:** dan sekarang tampilan dokumen akan seperti gambar berikut.

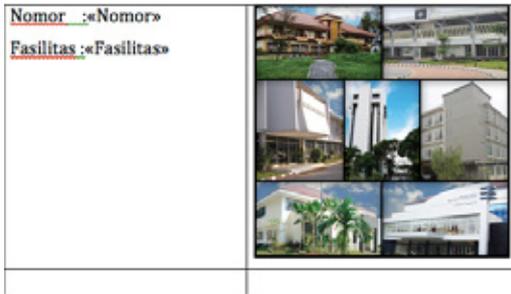
Nomor : «Nomor»	
Fasilitas : «Fasilitas»	

- 8 Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Klik pada kolom kedua tabel. **Win:** Pada **Insert** tab, **Illustrations** grup, klik **Picture** dan cari lokasi gambar. **Mac:** pada menu **Insert > picture > From File**.

- 9** Klik pada salah satu gambar katalog. **Win:** klik tanda panah pada tombol **Insert** dan pilih **Link to File**. **Mac :** di centang “**Link To File**”, lalu **Insert**



- 10** Tampilannya adalah seperti gambar berikut ini.



- 11** **Win:** **ALT + F9** untuk menampilkan kode field. **Mac:** **fn + alt/option + F9** Hapus nama file gambar. Pada tutorial ini, nama file adalah **unitdiklat**. Hasilnya adalah seperti gambar berikut.

```
{ INCLUDEPICTURE ".:jpg" \* MERGEFORMAT }
```

- 12** Pastikan posisi kursor masih berada di posisi nama file gambar (**roti**) yang sudah dihapus (lihat gambar di atas). Kemudian pada **Mailings** tab, grup **Write & Insert Fields**, klik **Insert Merge Field** dan pilih **Nama_Gambar**.

- 13** Tampilannya adalah seperti gambar berikut. Selanjutnya kita perlu menambahkan satu kode lagi agar gambar sesuai dengan datanya masing-masing.

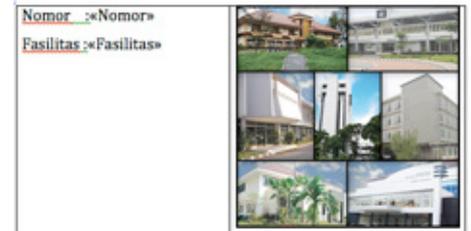
```
{ INCLUDEPICTURE " { MERGEFIELD Nama_Gambar }.jpg" \* MERGEFORMAT \d }
```

- 14** Pilih teks “**{MERGE FIELD Nama_Gambar}.jpg**” seperti contoh gambar berikut dan tekan tombol **CTRL + F9** (**Win**) atau **fn +command +F9** (**Mac**) untuk membuat kurung kurawal.

- 15** Pada posisi setelah kurung kurawal pembuka, ketik **IF TRUE** seperti contoh berikut. Tekan tombol **ALT + F9** (**win**) atau **fn + alt/option + F9** (**mac**) untuk menyembunyikan kode *field*. Hasilnya adalah seperti gambar berikut.

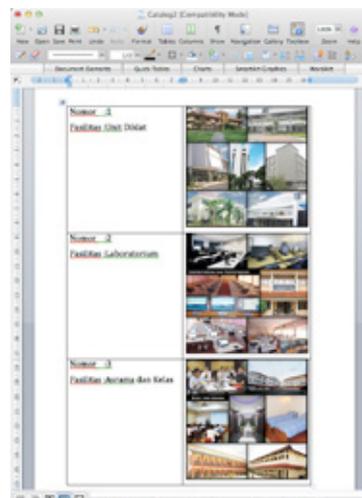
```
{ INCLUDEPICTURE { IF TRUE { MERGEFIELD Nama_Gambar }.jpg" } \* MERGEFORMAT \d }
```

- 16** **Win:** Klik tombol **Mailings** tab, klik **Preview Results**. Klik tanda panah untuk berpindah antar data/record. **Mac:** Lihat pada panel **Mail Merge Manager** dan tab **Preview Result**. Jika masih ada yang ingin diubah, klik lagi tombol **Preview Results** dan lakukan perubahan yang diinginkan.



- 17** Untuk menyimpan hasil mail merge, klik tombol **Finish & Merge**, pilih **Edit Individual Documents**, klik **All** dan **OK**. **Mac:** Pada panel **Mail Merge Manager**, pilih **Tab Complete Merge > Merge to New Document**

- 18** Tampilan hasil mail merge pada dokumen baru adalah seperti gambar berikut.



Katalog kita sudah jadi, dan telah dilengkapi pula dengan gambar. Semoga bermanfaat tips n trik nya.



Foto: M. Fath K.

Vacations and Holiday

oleh: Efi Dyah Indrawati - Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum

How's your feeling after Idul Fitri holiday? Refreshed, rejuvenated, or recharged? Do you enjoy a longer vacation only on Lebaran or Christmas? Have you used up your vacation time this year?

As we work in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, we take much of our time for work. Yes, it is our duty as a government official to do the best for our country. But, one should get away from it all every once in a while. Don't say that there's just too much to get done in your office: all employees deserve vacation and holidays.

Vacations are not a luxury, it's our need. Why vacations and holidays are also important for us, government officials? I will enlist some reasons in this article.

The first is that because there is more to life than work. While on vacations and holidays, we'll have an opportunity to think of matters besides work. Remember: don't take work with you on your vacation. Be selfish and think of yourself. You may think of your future. Where do you see yourself in five years? Take the question a little further to ten, fifteen, and then twenty years, and you will be surprised at the answers you get. Then, you can also think of your family, your asset, etc and gain more insight about them. Life is so precious, so appreciate it by also taking a break for a while.

The busy officials and executives spend a larger proportion of his time with his colleagues, users and customers than with members of his own family. The average fairly successful executives will probably remember more details of his work than those of his children (Some of my colleagues cannot remember their children's birthdays and even their own wedding anniversary!). The family vacation is, therefore, a golden opportunity for them to spend some quality with those that are ultimately more precious to them. Indeed, family should also be your priority besides work.

The second reason is taken from Barbara Reinhold, saying that vacation is as important as sleep. Can you imagine if you lack of sleep? You will decrease your ability to think clearly and act decisively. Lacking recreation will make you cranky, and often more than a little critical of the people in your department or unit who do have a good sense to take care of themselves. If I hear my colleagues' direct responses are slacking off, I usually ask them: "When did you have your last vacation?" I see that work addicts are not just hurting themselves, they could also hurt their co-workers, their work, the unit, even the Ministry of Finance. So, working to the brink of exhaustion costs not only your physical but also your mental state. Human are no machine (even a machine does really need to be rested). That is why, get some time off!

The third reason: vacations do not always need cost much, especially in Indonesia, where relatives and close friends are more than welcomed to help you. You can also enjoy your long holiday and vacation at home and still have fun. I know a friend of mine who took out his children to Europe every other year for two weeks for vacation. The total cost was the flight tickets, hotel accommodation, and all tourism expenses. But in six years, all his three children got scholarships in Germany, Netherland, and France, and I think that's enough to cover their expenses. He took vacation and also looked for opportunities to some colleagues and universities for his children, such a smart holiday plan he had.

The last reason, taking a longer holiday or vacation is also a chance to find out how essential you are to the institution or department. You could come back to find that everyone is overjoyed to see you because things have been falling between the chairs when you were away. The department really relies much on you. On the other hand, you could come back from your leave to discover that no one ever noticed your absence! ☹ For the second situation, take another break again soon but this time to plan your further action to shine at work. Then come back to work with a bang!

BPPK memiliki pemangku kepentingan dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan. Beberapa pimpinan kantor di beberapa wilayah kerja BDK (Balai Diklat Keuangan) tentu memiliki berbagai kesan, pesan dan harapan untuk BPPK. Edisi ini menampilkan dua kepala kantor yang berada di wilayah kerja BDK Pontianak dan BDK Medan.



**Marni Misnur, Kakanwil
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat**

Sejak diberlakukannya PMK 169/PMK.01/2012, Kanwil sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendapat

pelimpahan wewenang, salah satunya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terutama terkait Kajian Fiskal Regional. Di Kalimantan Barat sendiri, masalah yang dihadapi adalah kekurangan SDM secara ilmu dan pengalaman untuk melaksanakan hal tersebut. Diklat Penajaman Fungsi DJPB yang sebelumnya diselenggarakan oleh BPPK sedikit banyak telah membantu, meski ada aspek-aspek yang belum sepenuhnya tersentuh, salah satunya terkait Ekonomi Statistik. BPPK kalau bisa mengadakan diklat khusus terkait Ekonomi Statistik karena selama ini data yang kami dapat untuk KFR sifatnya sekunder dan tidak bisa kami uji akurasinya. Kami tidak ingin kajian yang kami buat tidak *apple-to-apple* sehingga laporan KFR yang kami buat akhirnya hanya untuk mengejar IKU, jangan sampai *garbage-in garbage-out*. Selain itu, di akhir tahun, BPPK sebaiknya tidak terlalu banyak menyelenggarakan diklat karena saat itulah volume pekerjaan kami meningkat berkali-kali lipat yang akhirnya kami tidak dapat memenuhi permintaan peserta dari BPPK. Terakhir, BPPK, dalam hal ini BDK Pontianak, harus lebih mengoptimalkan evaluasi terhadap pengajar sebagai referensi untuk menunjuk pengajar pada diklat-diklat berikutnya. Ketika BPPK belum bisa mengakomodasi pengajar yang memiliki kompetensi tertentu, jangan ragu untuk meminta bantuan Kanwil, bahkan kalau perlu akademisi dan/atau praktisi dari luar Kementerian Keuangan.



**Harta Indra Tarigan,
Kakanwil Direktorat
Jenderal Pajak
Provinsi Sumatera
Utara I**

Pendidikan dan pelatihan merupakan pendidikan yang

temporer. Saya berharap agar BDK Medan lebih aktif dan kapasitasnya diperbesar, agar semua pegawai, khususnya Kementerian Keuangan memperoleh kesempatan yang sama. BDK Medan harus kreatif dalam menyiapkan pengajar yang bukan hanya menguasai materi, namun juga harus mampu memotivasi agar terjadi perubahan pada peserta diklat. Untuk menghadapi tantangan yang ada, diharapkan pimpinan, pengajar maupun staf BDK Medan harus selalu *open-minded* dan melakukan *bench-marking* dengan BDK lain ataupun Balai Diklat di luar Kementerian Keuangan agar tetap menghasilkan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Saya berharap BDK Medan bisa lebih besar lagi, jangan cepat puas dengan apa yang telah dicapai dan tetap jalin kerjasama yang baik dengan *stakeholders*-nya. Tidak ada yang sempurna, namun kita berusaha untuk menuju kesempurnaan.

Sebagai penutup, saya menggambarkan BDK Medan dalam tiga kata, yaitu Inovatif, Komunikatif dan *Customer Satisfication*. **Inovatif** dalam mengantisipasi kebutuhan diklat di lingkup Kementerian Keuangan, **Komunikatif** dengan para *stakeholders* atas program-program diklat yang akan diselenggarakan, serta terus menerus berupaya memenuhi **Customer Satisfication** melalui pelayanan yang prima.

Kota HARAPAN

oleh: Shera Betania ; foto: Shera Betania

Kota ideal untuk pensiunan. Demikian julukan yang diberikan kepada kota Magelang. Suasana teduh, sejuk dan tanpa macet, tatakota yang rapi, jalanan yang tertib, pepohonan rindang mendukung julukan tersebut. Tak heran jika Magelang juga dikenal sebagai Kota Harapan: Hidup, Aman, Rapi, Asri, dan Nyaman.



Balai Diklat Kepemimpinan berada di jantung kota Magelang, tepatnya di jalan Alun Alun Utara Magelang. Kampus Radius Prawiro yang lebih akrab dikenal dengan sebutan “BPLK” oleh masyarakat sekitar. Banyak pejabat Kementerian Keuangan memiliki kenangan dengan kota dan kampus BDK Magelang. Disinilah para pemimpin di lingkungan Kementerian Keuangan ditempa untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Ciri khas Balai Diklat Kepemimpinan Magelang adalah menara air kota Magelang. Tepat di depan Balai Diklat, di lapangan alun-alun kota Magelang, terdapat sebuah tanki besar tempat penampungan air kota Magelang. Menara air yang terlihat seperti kompor ini masih berfungsi dan digunakan oleh PDAM kota Magelang untuk penampungan air. Di alun-alun kota Magelang juga terdapat patung Pangeran Diponegoro sedang menunggang kuda.

Para peserta diklat tentu akan merasa bosan jika setiap harinya hanya diisi dengan materi diklat. Akan lebih menarik jika peserta diklat mengeksplor daerah tempatnya mengikuti diklat. Seperti yang saya lakukan, mencoba mengeksplor kota Magelang dari sisi peserta diklat.

Saya dan beberapa temanpun diajak

mengunjungi Kupat tahu Pak Pangat. Terletak di jalan Senopati, Magelang, tempat makan ini menjadi salah satu ‘incaran’ peserta diklat. Menyajikan Kupat tahu khas, tempat makan ini buka dari pagi hingga menjelang sore. Kupat tahu berisi tahu, kubis, tauge, potongan bakwan, dan taburan kerupuk, semuanya disiram dengan kuah kacang. Tak heran jika kupat tahu ini laris dan terkenal di Magelang. Kupat tahu racikan Pak Pangat sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kupat tahu lainnya. Bumbu Kupat tahu diuleg langsung dipiring sehingga tidak ada bumbu yang tertinggal di cobek. Selain itu kubis yang digunakan dalam Kupat tahu digoreng terlebih dahulu selama 1 menit sebelum dipotong-potong, sehingga terasa renyah. Kupat tahu Pak Pangat memiliki 3 level rasa kepedasan, tidak pedas, sedang dan pedas. Jika Anda ingin rasa pedas, maka tambahan cabe siap diuleg menjadi satu dalam hidangan. Rasa Kupat tahu racikan Pak Pangat yang manis, gurih dan pedas membuat pelanggannya untuk kembali lagi mencicipi nikmatnya Kupat tahu Pak Pangat asli Magelang.

Kota teduh dan sejuk semakin lekat dengan Magelang jika Anda menjelajah kota kecil di Jawa Tengah ini. Hampir di setiap sudut kota ini terdapat taman.

Salah satu taman yang cukup besar dan cocok untuk keluarga adalah Taman Kyai Langgeng. Taman ini berisi banyak tanaman dengan berbagai jenis, dilengkapi jga dengan koleksi hewan dan beberapa alat permainan untuk anak-anak. Menurut pengelola taman ini, banyaknya tanaman di taman ini bermula dari inisiatif pengelola taman (pemerintah kota) yang meminta beberapa bibit tanaman dari beberapa perusahaan/institusi/lembaga yang ada di kota Magelang. Taman Kyai Langgeng seluas kurang lebih 5Ha diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu (1981), Muhammad Ismail. Nama Kyai Langgeng sendiri diambil dari salah satu pejuang dibawah pimpinan Pangeran Diponegoro.

Selain Taman Kyai Langgeng, kota Magelang yang sarat dengan sejarah. Beberapa museum yang ada di kota Magelang antara lain Museum Perjuangan Diponegoro dan Museum Sudirman. Museum Perjuangan Diponegoro adalah lokasi perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kock, dimana saat itu Jenderal Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Pemandangan depan museum sangatlah indah, Anda bisa melihat hamparan hijau pemandangan Magelang. Lain lagi dengan Museum

Sudirman. Rumah yang kini dijadikan museum ini adalah tempat wafatnya Jenderal Sudirman. Saat perang gerilya, beliau sakit dan meninggal di rumah peristirahatan ini.

Kalau di Bali ada restoran Bebek Tepi Sawah, di Magelang ada rumah makan entok tepi sawah bernama Warung Makan Setia Rasa. Menu utama di rumah makan yang terletak di Dusun Pucang, Kecamatan Secang ini adalah entok. Entok disajikan dalam sajian opor ataupun goreng, semua sama lezatnya. Kami mencoba menu entok goreng. Paling tepat dinikmati dengan nasi panas dan lalapan daun singkong. Entok goreng disiram kuah sambal ijo. Rasanya nikmat menggoyang lidah makin lengkap dengan suasana pedesaan yang tenang. Pengunjung rumah makan ini tak hanya datang dari Magelang, bahkan dari sekitar kota Magelang yang menyempatkan diri untuk menikmati gurihnya entok WM. Setia Rasa.

Ada satu pojok favorit peserta diklat. Salah satu sisi jalan yang diisi dengan warung makan. Sisi jalan Tentara Pelajar ini berada tak jauh dari alun-alun kota Magelang. Selain itu, Balai Diklat

Kepemimpinan menyediakan fasilitas sepeda yang dapat dimanfaatkan siswa diklat. Sepeda ini dimanfaatkan oleh peserta diklat untuk berkeliling kota Magelang.

Magelang juga terkenal dengan Akademi Militer dan sekolah Taruna Nusantara. Kedua sekolah ala militer. Akademi militer atau Akmil berada di kaki bukit Tidar. Bukit yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Pakunya Pulau Jawa ini juga dijadikan sarana latihan oleh siswa Akademi Militer.

Puas berkeliling dan menikmati kota Magelang, tak puas rasanya kalau tidak membawa buah tangan. Toko Endang Jaya sudah identik dengan Magelang. Toko oleh-oleh ini menyajikan berbagai jenis makanan oleh-oleh. Toko oleh-oleh ini menjual berbagai cemilan khas Magelang seperti gethuk, yangko, bakpia, slondok, jenang, rangin, tape ketan. Satu yang sangat terkenal dari toko oleh-oleh ini adalah gethuknya.

Magelang tak kalah dengan kota lainnya yang memiliki fasilitas pusat perbelanjaan (mall). Armada Town Square adalah satu-satunya pusat

perbelanjaan modern di Magelang. Mall yang mulai dibuka pada tahun 2011 ini memiliki tiga lantai. Mall ini juga menyediakan penginapan atau hotel. Kehadiran mall ini menambah semarak kota Magelang.

Selain beberapa tempat di atas, Magelang juga terkenal dengan obyek wisata Borobudur dan Ketep Pass. Keindahan candi Borobudur yang telah mendapat pengakuan dunia, tak pernah lekang oleh waktu. Kemegahan dan cerita dibaliknya menjadi daya tarik tersendiri. Ketep Pass adalah gardu pandang untuk melihat gunung Merapi. Dari tempat ini kita bisa melihat kegagahan gunung yang pernah meletus di tahun 2010 dari kejauhan. Selain itu, ada juga museum Vulkanologi yang menyajikan informasi seputar aktifitas gunung berapi.

Magelang, kota kecil yang sejuk dan bersahaja. Kota yang memberikan ketenangan dan kenyamanan. Kota yang memberi kenangan bagi siapapun yang tinggal ataupun pernah tinggal (walaupun sesaat) di dalamnya. Kota yang bisa jadi tepat untuk menghabiskan sisa umur di kala senja.



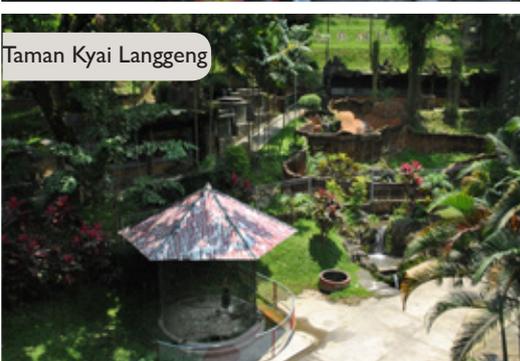
Tahu Kupat



Museum Sudirman



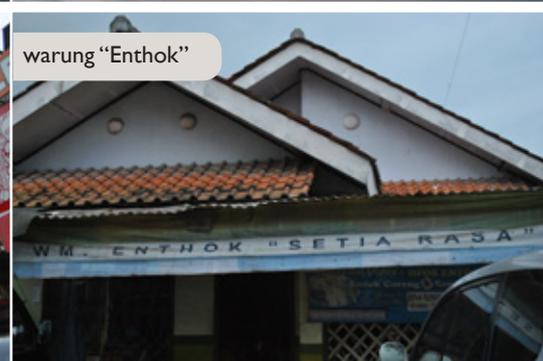
Akademi Militer



Taman Kyai Langgeng



Toko Oleh-Oleh



warung "Enthok"

Kalender Diklat BPPK 2014...



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Pusdiklat Bea dan Cukai



Pusdiklat Kekayaan Negara
dan Perimbangan Keuangan



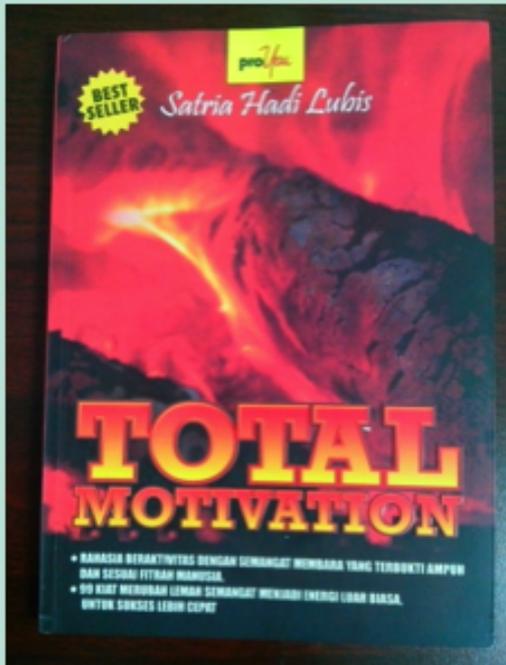
Pusdiklat Pajak



Pusdiklat Keuangan Umum



Pusdiklat Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Resensi Buku “Total Motivation”

Oleh: Supriyanto -
Widyaiswara Pusdiklat PSDM

Judul Buku : Total Motivation
Penulis : Satria Hadi Lubis, MM., MBA
Penerbit : PRO-YOU Kelompok Pro-U
Cetakan : VI - tahun 2009

Resensi

Pada bagian ke-1 buku ini membahas tentang pentingnya memotivasi diri. Pembahasan dimulai dengan penjabaran definisi motivasi dan teori motivasi oleh beberapa pakar di bidangnya, seperti teori Maslow, McClelland, B.F. Skinner, dan lain-lain. Pengertian dan teori motivasi diuraikan dalam dua teori, yaitu teori kepuasan (*content theory*) dan teori proses (*process theory*). Pada bagian ini juga dibahas mengenai urgensi memotivasi diri sebagai modal awal sukses. Penulis menguraikan 14 urgensi betapa pentingnya memotivasi diri sendiri yaitu:

1. Selalu semangat
2. Tekun dalam bekerja
3. Tidak tergantung pada motivasi orang lain
4. Selalu berinisiatif dan kreatif
5. Produktif dalam bekerja
6. Tercapainya tujuan yang diinginkan
7. Meraih tujuan lebih cepat
8. Optimis terhadap masa depan
9. Menikmati hidup dan pekerjaan
10. Terhindar dari kesepian
11. Terhindar dari rasa jenuh
12. Menunaikan kewajiban syar'i
13. Melaksanakan sunnah Rasul
14. Memperoleh sukses di dunia dan akhirat.

Diuraikan pula pada pembahasan selanjutnya tentang hambatan-hambatan mengapa orang menjadi sulit dalam melakukan motivasi dirinya. Orang terhambat memotivasi diri karena:

1. Kurangnya kepercayaan diri
2. Cemas
3. Opini negatif
4. Perasaan tidak ada masa depan
5. Merasa diri tidak penting
6. Tidak tahu apa yang terjadi

7. Pengakuan semu.

Selanjutnya dijelaskan oleh penulis tentang model motivasi diri “Total Motivation” melibatkan empat sumber pemicu motivasi yang berasal dari empat dimensi manusia. Keempat dimensi tersebut adalah visualisasi untuk dimensi mental, tanggung jawab untuk dimensi spiritual, kenyamanan dan kesukaan untuk dimensi emosional, dan gerakan untuk dimensi fisik.

Pada bagian ke-2 dijelaskan 99 kiat memotivasi diri dan mengatasi futur (lemah semangat), terdapat dalam 4 BAB, beberapa diantaranya adalah :

- ▶ BAB 1 KIAT MENTAL. Dalam Bab ini diuraikan 41 kiat.
- ▶ BAB 2 KIAT SPIRITUAL. Kiat-kiat dalam bab 2 ini terdiri atas 16 kiat.
- ▶ BAB 3 KIAT EMOSI. Kiat emosi terdiri dari 32 kiat.
 - a. Kiat 66 – Lakukan silaturahmi kepada orang yang mampu memotivasi Anda.
 - b. Kiat 73 – Cari kemenangan-kemenangan kecil.
 - c. Kiat 79 – Pergilah ke tempat-tempat baru.
- ▶ BAB 4 KIAT FISIK. Dalam bab terakhir diuraikan 10 kiat terkait fisik manusia.

Menurut buku ini, untuk menumbuhkan motivasi diri sebenarnya banyak caranya. Dibutuhkan kreativitas agar kita dapat memicu munculnya motivasi yang tinggi dalam diri kita. Kreativitas tersebut berputar pada stimulus sumber pemicu motivasi yang ada pada empat dimensi manusia tersebut. Buku ini merupakan petunjuk yang mudah dimengerti dan membutuhkan komitmen yang kuat untuk menjalankannya.

Kang Edu



Oleh: Bimo



korupsi
berakibat

KERUGIAN DIRI



bppk
against
corruption

EDUKASI
KEUANGAN

EDISI 21/2014

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873
Fax: +62 21 7262175
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>